SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dampak negatif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Konfederasi. . .

Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan. . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral. Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the*

Republic. . .

Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss. Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, terutama yang bersifat transnasional, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda (*double criminality*).

Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) ini mengatur antara lain mengenai ruang lingkup bantuan hukum timbal balik, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan bantuan, biaya, kewajiban internasional, konsultasi, penyelesaian perselisihan, dan amendemen perjanjian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6544

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KONFEDERASI SWISS

Republik Indonesia
dan
Konfederasi Swiss

Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak

MENIMBANG ikatan persahabatan dan kerja sama yang menyatukan keduanya;

MENGAKUI bahwa upaya melawan kejahatan lintas negara adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional;

MENYADARI perlunya untuk memperkuat kerja sama hukum, terutama bantuan hukum timbal balik, untuk mencegah meningkatnya tindak pidana;

BERKEINGINAN untuk saling memberikan bantuan hukum timbal balik seluas-luasnya guna memerangi kejahatan dan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana;

DENGAN MEMPERHATIKAN Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak serta prinsip-prinsip hukum internasional, terutama kedaulatan, integritas wilayah dan nonintervensi dan menghormati tatanan hukum internal dari Para Pihak;

MEMPERHATIKAN prinsip-prinsip yang diletakkan dalam konvensi-konvensi internasional yang relevan, termasuk di bidang hak asasi manusia, dan dalam upaya untuk bekerja sama demi kemajuannya;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut

BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kewajiban untuk Memberikan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Para Pihak berupaya untuk saling memberikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang hukumannya pada saat permintaan bantuan diajukan, berada dalam yurisdiksi pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta.

Pasal 2
Ruang Lingkup Bantuan

1. Bantuan meliputi langkah-langkah berikut yang diambil untuk mempercepat proses hukum pidana di Negara Peminta, yaitu
   a) pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya;
   b) pengiriman barang, dokumen, catatan dan bukti;
   c) penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau pengembalian;
   d) penyediaan informasi;
   e) penggeledahan badan dan properti;
   f) pelacakan dan pengidentifikasian orang dan properti, termasuk memeriksa barang dan tempat;
   g) menelusuri, membekukan, menyita dan merampas hasil dan sarana kejahatan;

h) penyampaian dokumen;

i) menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau konfrontasi;

j) mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di Negara Peminta;

k) bantuan lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.

2. Perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

3. Para Pihak saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya yang berkaitan dengan tindak pidana fiskal sesuai dengan hukum nasional masing-masing Pihak.

Pasal 3

Pengecualian

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap hal-hal berikut

a) pelacakan, penangkapan atau penahanan dari seseorang yang dituntut atau dipidana atas suatu tindak pidana dengan maksud untuk diekstradisi;

b) eksekusi putusan pidana;

c) pemindahan narapidana untuk tujuan menjalani hukuman; dan

d) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

Pasal 4

Alasan Penolakan atau Penundaan Bantuan

1. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat ditolak apabila

   a) permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang oleh Negara Diminta dianggap sebagai tindak pidana politik atau tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana politik;

   b) permintaan tersebut menyangkut tindak pidana yang diatur dalam hukum militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;

c) Negara Diminta memandang bahwa pelaksanaan permintaan tersebut kemungkinan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan utama lainnya dari negara tersebut sebagaimana ditentukan oleh otoritas yang berwenang;

d) permintaan tersebut menyangkut fakta-fakta yang mendasari seseorang yang diadili telah dibebaskan, diampuni atau dihukum di Negara Diminta untuk satu tindak pidana yang pada dasarnya sama. sepanjang hukuman yang dijatuhkan saat ini sedang dijalani atau telah dijalani;

e) terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, jenis kelamin atau pendapat politiknya atau bahwa dikabulkannya permintaan tersebut dapat memperburuk situasi orang tersebut karena alasan tersebut;

f) terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa proses hukum pidana terhadap orang yang dituntut tidak sesuai dengan jaminan yang dimuat dalam instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 16 Desember 1966;

g) permintaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diancam hukuman mati di Negara Peminta kecuali Negara Peminta memberikan jaminan sehingga Negara Diminta memandang cukup bahwa hukuman mati tidak akan diupayakan, dijatuhkan atau, jika dijatuhkan, tidak akan dilaksanakan.

2. Negara Diminta dapat menunda bantuan hukum timbal balik jika pelaksanaan permintaan tersebut akan mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan di Negara Diminta.

3. Sebelum menolak atau menunda bantuan hukum timbal balik sesuai dengan Pasal ini, Negara Diminta harus

a) segera menginformasikan kepada Negara Peminta alasan untuk mempertimbangkan penolakan atau penundaan bantuan; dan

b) mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat dan kondisi tertentu yang dianggap perlu. Jika demikian, syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Negara Peminta.

BAB II – PERMINTAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Pasal 5
Hukum yang berlaku

1. Permintaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta.
2. Jika Negara Peminta menginginkan penerapan prosedur khusus sehubungan dengan pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik, hal tersebut secara tegas harus diminta, dan Negara Diminta harus memenuhi permintaan tersebut sepanjang hukum nasionalnya tidak melarang.

Pasal 6
Kejahatan Ganda dan Upaya Paksa

1. Pelaksanaan permintaan yang melibatkan upaya paksa diberikan hanya jika tindakan yang disangkakan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional Para Pihak.
2. Dalam menentukan apakah tindakan yang disangkakan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional Para Pihak, menjadi tidak relevan apakah hukum nasional Para Pihak menempatkan tindakan yang disangkakan dalam kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama. Fakta yang dijelaskan dalam permintaan tersebut harus sesuai dengan elemen objektif dari tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.
3. Upaya paksa meliputi
   a) penggeledahan badan dan properti;
   b) penyitaan barang bukti, termasuk sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta barang dan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut;
   c) tindakan apa pun yang bertujuan untuk membuka rahasia yang dilindungi oleh hukum pidana Negara Diminta; dan
   d) tindakan lain yang melibatkan upaya paksa sesuai dengan hukum acara dari Negara Diminta.

4. Kejahatan ganda tidak harus dimintakan untuk pelaksanaan permintaan yang tidak melibatkan upaya paksa.

Pasal 7

Tindakan Sementara

Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas dari Negara Peminta, tindakan sementara harus diperintahkan oleh otoritas berwenang dari Negara Diminta untuk menjaga situasi yang ada, untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam atau untuk melindungi bukti yang terancam bahaya, jika proses hukum yang dipertimbangkan oleh permintaan tersebut tidak tampak jelas untuk tidak diterima atau tidak sesuai menurut hukum nasional Negara Diminta.

Pasal 8

Batas Penggunaan Informasi, Dokumen, dan Barang

1. Negara Peminta tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Otoritas Pusat Negara Diminta.
2. Persetujuan ini tidak perlu apabila
   a) proses hukum pidana asing ditujukan terhadap orang lain yang berpartisipasi dalam tindak pidana; atau
   b) bahan tersebut digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum terkait kompensasi atas kerugian yang berhubungan dengan proses hukum yang kepadanya bantuan itu telah diberikan.

Pasal 9

Data pribadi

1. Data pribadi yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini hanya digunakan untuk tujuan data itu dikirim dan tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Negara Pengirim. Merujuk pada pengecualian sesuai dengan Pasal 8 ayat 2

huruf a - b, penggunaan data untuk tujuan lain memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Negara yang mengirimkan data.

2. Ketentuan berikut berlaku untuk pengiriman dan penggunaan data pribadi yang dikirimkan untuk tujuan permintaan bantuan berdasarkan Perjanjian ini
   a) Hanya data yang berkaitan dengan permintaan yang dikirimkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.
   b) Berdasarkan permintaan, Pihak yang telah menerima data harus memberitahukan kepada Negara Pengirim mengenai penggunaan data tersebut dan hasil yang diperoleh darinya.
   c) Apabila menurut Negara Pengirim, data yang dikirimkan adalah data yang salah atau yang seharusnya tidak dikirim, maka Negara Pengirim harus sesegera mungkin memberitahukan hal itu kepada Negara Penerima data. Negara Penerima data harus sesegera mungkin memperbaiki kesalahan itu atau menghancurkan data tersebut.
   d) Para Pihak harus menyimpan catatan dalam bentuk yang mudah diakses mengenai pengiriman dan penerimaan data.
   e) Pemindahan data pribadi selanjutnya hanya diizinkan sesuai dengan peraturan nasional dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara Pengirim.
   f) Data terkirim yang tidak lagi digunakan untuk tujuan yang diizinkan sesuai dengan Perjanjian ini harus dimusnahkan sesegera mungkin, atau dilakukan tindakan lain yang diizinkan sesuai dengan hukum nasional yang dengan cara yang sama dapat memberikan hak seseorang yang terkena dampak.
3. Para Pihak harus melindungi data pribadi dari kehilangan akibat ketidaksengajaan, penghancuran atau modifikasi yang tidak disengaja atau tidak sah, akses, penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah, atau penyalahgunaan lainnya.
4. Para Pihak harus menjamin hak-hak yang sah dari orang yang terkena dampak dari pengiriman data berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan informasi dan akses terhadap data mengenai dirinya, koreksi atau penghapusan data tersebut atau pembatasan pemrosesan data tersebut dalam kasus terkait; dan upaya peradilan yang efektif, atas permintaan orang

yang bersangkutan, berkaitan dengan pengiriman atau penggunaan informasi tersebut.

5. Para Pihak dapat membatasi keseluruhan atau sebagian hak orang yang bersangkutan berkaitan dengan informasi dan akses terhadap data, termasuk informasi mengenai penolakan pembetulan atau penghapusan data pribadi atau pembatasan pemrosesan, apabila hal ini merupakan tindakan yang diperlukan dan proporsional untuk mempertimbangkan kepentingan yang sah sehingga dapat melindungi keamanan publik dan nasional, melindungi hak dan kebebasan orang lain, menghindari terhambatnya proses penyelidikan, penyidikan atau proses persidangan, atau menghindari terhambatnya tindakan pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana atau eksekusi putusan pidana.

Pasal 10

Kehadiran Orang untuk Berpartisipasi dalam Proses Hukum

Atas permintaan yang dinyatakan dengan jelas oleh Negara Peminta, Otoritas Pusat Negara Diminta harus menyebutkan tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan tersebut. Pejabat dan mereka yang terlibat dapat hadir apabila Negara Diminta menyetujuinya.

Pasal 11

Pengambilan Kesaksian di Negara Diminta

1. Saksi harus didengar kesaksiannya sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta. Meskipun demikian, mereka juga dapat menolak untuk memberi kesaksian jika hukum nasional Negara Peminta mengizinkan mereka melakukannya.
2. Jika penolakan mereka untuk bersaksi didasarkan pada hukum nasional Negara Peminta, Negara Diminta harus menyerahkan hal ini kepada Negara Peminta untuk diputuskan. Alasan keputusan menolak harus diberikan.
3. Seorang saksi yang menggunakan haknya untuk menolak memberikan kesaksian tidak dapat dikenai sanksi hukum apa pun di Negara Peminta karena alasan tersebut.

Pasal 12

Pengiriman Barang, Dokumen, Catatan atau Bukti

1. Atas permintaan, Negara Diminta harus mengirimkan barang, dokumen, catatan atau bukti ke Negara Peminta.
2. Negara Diminta dapat mengirimkan salinan dokumen, catatan atau bukti yang diminta. Jika Negara Peminta secara jelas meminta pengiriman dokumen asli, Negara Diminta harus berusaha keras untuk memenuhi permintaan tersebut.
3. Negara Peminta diharuskan untuk mengembalikan apa yang dikirimkan sesegera mungkin atau selambat–lambatnya setelah persidangan selesai, kecuali Negara Diminta secara jelas melepaskan kewajiban Negara Peminta untuk mengembalikannya.
4. Hak-hak yang diklaim oleh pihak ketiga atas barang, dokumen, catatan, atau bukti di Negara Diminta tidak akan menghalangi pengirimannya ke Negara Peminta.

Pasal 13

Catatan Hakim, Pengadilan, atau Penyidik yang Berwenang

1. Atas permintaan, Negara Diminta harus menyediakan kepada pihak berwenang Negara Peminta catatan pengadilan atau catatan penyidik yang berwenang, termasuk putusan dan keputusan, apabila catatan ini penting untuk proses peradilan.
2. Dokumen, catatan, dan bahan lainnya hanya akan diserahkan jika menyangkut kasus yang telah selesai. Jika kasusnya belum selesai, otoritas yang berwenang dari Negara Diminta akan memutuskan apakah hal tersebut diizinkan.

Pasal 14

Catatan Peradilan dan Pertukaran Informasi

1. Negara Diminta harus menyampaikan intisari dan informasi yang berkaitan dengan catatan peradilan, yang diminta oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum yang berwenang di Negara Peminta dan dibutuhkan dalam masalah pidana, sepanjang diizinkan oleh hukum nasional.

2. Dalam hal apa pun selain yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, permintaan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum nasional, peraturan atau pelaksanaannya dari Negara Diminta.
3. Para Pihak, sesuai dengan hukum nasional masing-masing, dapat memberikan informasi tentang semua hukuman pidana dan tindakan selanjutnya yang terdapat di dalam catatan pengadilan terkait dengan warga negara dari salah satu Pihak.

Pasal 15

Penyerahan Barang dan Aset

1. Barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana yang dituntut oleh Negara Peminta dan sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikenai penyitaan, atau penggantinya dengan nilai yang setara, dapat diserahkan kepada Negara Peminta untuk tujuan perampasan atau pengembalian kepada orang yang berhak, tunduk pada hak pihak ketiga yang beritikad baik.
2. Sebagai aturan, penyerahan harus dilakukan berdasarkan perintah final dan dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari Negara Peminta; meskipun demikian, barang dan aset itu juga dapat diserahkan oleh Negara Diminta, berdasarkan hukum nasional dan setelah adanya persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila pada tahapan proses hukum sebelumnya asal-usulnya terbukti tidak sah.

Pasal 16

Pembagian Aset yang Dirampas

1. Para Pihak berupaya untuk saling bekerja sama seluas-luasnya dalam hal pembagian aset yang dirampas sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Untuk hal pembagian aset rampasan sesuai pengertian dalam Pasal ini, Para Pihak harus membuat kesepakatan untuk setiap kasus, yaitu perjanjian atau pengaturan khusus berdasarkan persyaratan tertentu terkait permintaan, penyerahan dan pengalihan aset rampasan yang dibagi termaksud.

Pasal 17

Pengiriman di bawah Pengawasan

1. Para Pihak berupaya untuk memastikan bahwa, atas permintaan Pihak lainnya, pengiriman di bawah pengawasan dapat diizinkan di dalam wilayahnya dalam rangka penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang dapat diekstradisi.
2. Keputusan untuk melakukan pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan untuk masing-masing kasus oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta, dengan memperhatikan hukum nasional Negara tersebut.
3. Pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur di Negara Diminta. Kewenangan untuk bertindak, mengarahkan, dan mengendalikan ada pada otoritas yang berwenang di Negara tersebut.

BAB III – PENYAMPAIAN DAN KEHADIRAN

Pasal 18

Penyampaian Surat Perintah dan Salinan Putusan Pengadilan

1. Negara Diminta akan menyampaikan surat perintah dan salinan putusan pengadilan yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan ini oleh Negara Peminta.
2. Penyampaian dapat dilakukan dengan pengiriman secara sederhana atas surat perintah atau salinan kepada orang yang akan dituju oleh Negara Diminta. Jika Negara Peminta secara tegas menyampaikan permintaannya, penyampaian harus dilakukan oleh Negara Diminta dengan cara yang diberikan untuk penyampaian dokumen serupa menurut undang-undangnya sendiri atau dengan cara yang sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. Bukti penyampaian diberikan dengan tanda terima yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh orang yang dituju atau melalui deklarasi yang dibuat oleh Negara Diminta bahwa penyampaian telah dilakukan dan menyatakan bentuk serta tanggal penyampaian tersebut. Salah satu dari dokumen tersebut harus segera dikirim ke Negara Peminta. Negara Diminta harus, jika Negara Peminta meminta, menyatakan apakah penyampaian telah dilakukan sesuai dengan

hukum nasional Negara Diminta. Apabila penyampaian tidak dapat dilakukan, alasannya harus segera disampaikan secara tertulis kepada Negara Peminta.

4. Permintaan untuk menyampaikan dokumen untuk memanggil orang yang dituntut yang berada di wilayah Negara Diminta harus diterima Otoritas Pusat Negara tersebut paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal yang ditetapkan untuk kehadiran.

Pasal 19

Kehadiran Saksi atau Ahli di Negara Peminta

1. Jika Negara Peminta menganggap bahwa kehadiran dari seorang saksi atau ahli pada pengadilan yang berwenangnya diperlukan, maka harus disebutkan dalam permintaan untuk menyampaikan panggilan tersebut dan Negara Diminta akan mengundang saksi atau ahli untuk hadir di wilayah Negara Peminta.
2. Negara Diminta harus, sesegera mungkin, melakukan komunikasi secara tertulis dengan Negara Peminta mengenai keputusan saksi atau ahli sehubungan dengan undangan tersebut.
3. Seorang saksi atau ahli yang setuju untuk hadir di Negara Peminta dapat meminta Negara tersebut untuk memberikan uang muka atas biaya perjalanan dan uang harian.
4. Tunjangan yang harus dibayar dan biaya perjalanan serta uang harian yang akan dibayarkan kembali kepada saksi atau ahli oleh Negara Peminta harus dihitung dari tempat tinggalnya dan dengan tarif yang setidaknya sama dengan skala dan peraturan yang berlaku di Negara tempat pemeriksaan akan berlangsung.

Pasal 20

Kegagalan untuk Hadir

Seorang saksi atau ahli yang telah gagal untuk menjawab surat panggilan kehadiran, penyampaian yang telah dimintakan, tidak dapat, walaupun surat panggilan berisi pemberitahuan hukuman, dikenai hukuman atau tindakan penahanan, kecuali jika dia secara sukarela memasuki wilayah Negara Peminta dan dipanggil kembali.

Pasal 21

Tindakan Jaminan Keselamatan

1. Seorang saksi atau ahli, apa pun kewarganegaraannya, yang hadir dalam sebuah panggilan di hadapan pengadilan yang berwenang di Negara Peminta tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya di wilayah Negara Peminta sehubungan dengan tindakan atau hukuman di balik keberangkatannya dari wilayah Negara Diminta.
2. Seseorang, apa pun kewarganegaraannya, yang dipanggil ke hadapan pengadilan yang berwenang Negara Peminta untuk menjawab tindakan yang membentuk subjek persidangan yang melawannya, tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya sehubungan dengan tindakan atau hukuman di balik kepergiannya dari wilayah Negara Diminta dan tidak disebutkan dalam surat panggilan.
3. Tanpa persetujuan tertulisnya, seseorang yang diatur pada ayat 1 dan 2 tidak dapat diminta untuk bersaksi dalam konteks persidangan yang berbeda dengan yang dimintakan berdasarkan permintaan bantuan hukum timbal balik.
4. Kekebalan yang diatur dalam Pasal ini tidak akan berlaku pada saat saksi atau ahli atau orang yang diadili, telah, untuk jangka waktu tiga puluh hari berturut-turut sejak tanggal kehadirannya tidak lagi diharuskan oleh pengadilan yang berwenang, memiliki kesempatan untuk meninggalkan Negara Peminta, tetap berada di wilayah tersebut, atau telah meninggalkannya, namun kembali.
5. Seseorang yang setuju untuk hadir sesuai dengan Pasal 19 atau Pasal 23 tidak dapat dituntut berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk kesaksian palsu.

Pasal 22

Jangkauan Kesaksian di Negara Peminta

1. Seseorang yang hadir dalam sebuah panggilan di Negara Peminta dapat diminta untuk memberikan kesaksian atau untuk menghasilkan bukti kecuali di bawah hukum dari salah satu Pihak, dia berhak menolak.
2. Pasal 8 dan Pasal 11, ayat 2 dan 3 berlaku sama.

Pasal 23

Pemindahan Sementara Orang yang Ditahan

1. Seseorang yang ditahan yang dihadirkan sebagai saksi atau dengan tujuan konfrontasi diajukan oleh Negara Peminta harus dipindahkan sementara ke lokasi pemeriksaan akan berlangsung, asalkan dia akan dikembalikan ke wilayah Negara Diminta dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Negara Diminta dan tunduk pada ketentuan Pasal 21 dari Perjanjian ini sejauh hal ini dapat diterapkan.
2. Pemindahan dapat ditolak apabila
   a) orang yang ditahan tidak menyetujuinya;
   b) kehadirannya diperlukan dalam proses hukum pidana yang masih berjalan di wilayah Negara Diminta;
   c) pemindahan dapat memperpanjang masa penahanannya;
   d) Negara Peminta tidak dalam posisi untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Negara Diminta yang berkaitan dengan penahanan atau keamanan orang yang akan dipindahkan; atau
   e) ada alasan utama lainnya untuk tidak memindahkan dia ke wilayah Negara Peminta.
3. Orang yang dipindahkan harus tetap berada dalam tahanan di wilayah Negara Peminta, kecuali Negara Diminta menetapkan pembebasannya.
4. Orang yang dipindahkan harus menerima pengurangan masa tahanannya di Negara Diminta sesuai dengan kurun waktu keberadaannya dalam tahanan di Negara Peminta.

Pasal 24

Pemeriksaan melalui Konferensi Video

1. Jika seseorang berada di satu wilayah Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau ahli oleh pengadilan yang berwenang dari Pihak lainnya, orang tersebut dapat, apabila tidak menginginkan atau memungkinkan bagi orang dimaksud yang akan didengar kesaksiannya untuk hadir di wilayahnya, meminta agar pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui konferensi video, sebagaimana diatur pada ayat 2 sampai ayat 6 dalam Pasal ini.

2. Negara Diminta harus menyetujui pemeriksaan dengan konferensi video sepanjang penggunaan konferensi video tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya. Jika Negara Diminta tidak memiliki akses terhadap sarana teknis untuk konferensi video, sarana tersebut dapat disediakan oleh Negara Peminta dengan persetujuan di antara keduanya.
3. Pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta harus memanggil orang yang bersangkutan untuk hadir sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Dengan mengacu pada pemeriksaan melalui konferensi video, peraturan berikut harus berlaku.
   a) Pejabat pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta hadir pada saat pemeriksaan, jika diperlukan, dibantu oleh seorang penerjemah dan juga bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi orang yang akan didengar dan penghormatan terhadap dasar hukum nasional Negara Diminta. Apabila lembaga pengadilan dari Negara Diminta berpandangan bahwa selama pemeriksaan, prinsip-prinsip dasar hukum nasional Negara Diminta telah dilanggar, harus segera diambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar sidang terus berlanjut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut;
   b) tindakan untuk melindungi orang yang akan didengar harus disepakati, jika diperlukan, antara otoritas yang berwenang dari Negara Peminta dan Negara Diminta;
   c) pemeriksaan di persidangan harus dilakukan secara langsung oleh, atau di bawah arahan, pengadilan yang berwenang Negara Peminta sesuai dengan undang-undangnya sendiri;
   d) atas permintaan Negara Peminta atau orang yang akan didengar, Negara Diminta harus memastikan agar orang yang akan didengar dibantu oleh seorang penerjemah, jika diperlukan;
   e) orang yang akan didengar dapat mengklaim hak untuk tidak memberi kesaksian yang akan dikenakan kepadanya menurut undang-undang Negara Diminta atau Negara Peminta.
5. Tanpa berprasangka terhadap setiap tindakan yang disetujui untuk melindungi orang, pengadilan yang berwenang di Negara Diminta pada akhir persidangan akan menyiapkan berita acara yang menunjukkan tanggal dan tempat

pemeriksaan, identitas orang tersebut, identitas dan fungsi semua orang lain di Negara Diminta yang berpartisipasi dalam pemeriksaan, sumpah yang diambil dan kondisi teknis tempat pemeriksaan berlangsung. Dokumen tersebut harus diteruskan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.

6. Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa, ketika para saksi atau ahli yang diperiksa di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan Pasal ini, menolak untuk memberi kesaksian meskipun berkewajiban untuk bersaksi berdasarkan kebenaran, hukum nasionalnya berlaku sama seperti jika pemeriksaan terjadi berdasarkan prosedur nasionalnya.
7. Para Pihak, berdasarkan diskresi, dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini jika dipandang patut dan dengan persetujuan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka. Dalam hal ini, keputusan untuk mengadakan konferensi video, dan cara konferensi video dilakukan, tunduk pada kesepakatan antara Para Pihak sesuai dengan hukum nasional mereka dan instrumen internasional yang relevan termasuk Kovenan Internasional 16 Desember 1966 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya.

BAB IV – PROSEDUR

Pasal 25
Otoritas Pusat

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk Konfederasi Swiss adalah Kantor Kehakiman Federal Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal.
2. Otoritas Pusat mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang tercakup dalam Perjanjian ini atas nama otoritas berwenangnya dan menerima permintaan yang dibuat Pihak lainnya.

3. Otoritas Pusat Negara Diminta harus memproses permintaan bantuan hukum timbal balik sesegera mungkin dan, apabila dimungkinkan, menyampaikannya kepada otoritas berwenang untuk dilaksanakan. Otoritas Pusat melakukan koordinasi terus-menerus berkaitan dengan pelaksanaan permintaan ini.
4. Otoritas Pusat dari Para Pihak harus saling berkomunikasi secara langsung satu sama lain.
5. Otoritas Pusat dari Para Pihak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
6. Masing-masing Pihak dapat mengubah Otoritas Pusatnya; dalam hal ini pemberitahuan harus diberikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

Pasal 26

Bentuk Permintaan dan Saluran Pengiriman

1. Permintaan bantuan hukum timbal balik harus dibuat secara tertulis.
2. Permintaan dapat dikirimkan, dalam keadaan yang mendesak, melalui faksimile atau dengan cara lain yang diakui oleh Negara Diminta. Permintaan asli akan dikirimkan dalam waktu delapan hari.

Pasal 27

Isi Permintaan

1. Permintaan harus mencantumkan
   a) nama otoritas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan atau proses persidangan yang berkaitan dengan permintaan tersebut;
   b) tujuan dan alasan permintaan;
   c) gambaran rinci tentang bukti, informasi atau tindakan yang diminta;
   d) jika memungkinkan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan dan alamat saat ini dari orang yang menjadi subjek proses hukum pidana;
   e) alasan utama permintaan bukti atau informasi, serta ringkasan fakta-fakta yang relevan (tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana tersebut dilakukan) yang menyebabkan persidangan di Negara Peminta, kecuali jika permintaan tersebut diajukan untuk penyampaian sebagaimana diatur dalam Pasal 18;

f) hubungan antara fakta yang sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Negara Peminta dan tindakan yang harus diambil di Negara Diminta;

g) teks ketentuan undang-undang, atau bila tidak memungkinkan, pernyataan terkait hukum yang berlaku;

h) tingkat kerahasiaan yang diperlukan dan alasannya;

i) batas waktu yang sesuai dengan permintaan yang diinginkan; dan

j) informasi atau tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional Negara Peminta atau yang sebaliknya diperlukan untuk pelaksanaan permintaan dengan benar.

2. Selain itu, permintaan harus mencakup

a) dalam hal penerapan hukum asing sehubungan dengan pelaksanaan permintaan (Pasal 5, ayat 2), teks ketentuan hukum yang berlaku di Negara Peminta dan alasan penerapannya;

b) dalam hal partisipasi orang dalam proses persidangan (Pasal 10), penunjukan orang yang menghadiri pelaksanaan permintaan tersebut dan alasan kehadirannya;

c) tempat yang diduga serta deskripsi barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau alasan utama mengapa barang dan aset tersebut seharusnya berada di wilayah Negara Diminta;

d) dalam hal penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan dan surat panggilan (Pasal 18 dan Pasal 19), nama dan alamat orang yang dituju;

e) dalam hal pemanggilan saksi atau ahli (Pasal 19), pernyataan Negara Peminta untuk membayar biaya dan tunjangan, dan jika diminta, melakukan pembayaran di muka;

f) dalam hal pemindahan sementara orang yang ditahan (Pasal 23), nama orang tersebut, indikasi pejabat yang melakukan pengawasan selama masa pemindahan, tempat orang yang ditahan akan dipindahkan dan perkiraan tanggal kembalinya orang dalam tahanan tersebut;

g) dalam hal proses pemeriksaan dilakukan melalui konferensi video (Pasal 24), alasan mengapa saksi atau ahli tidak ingin atau tidak mungkin hadir,

nama pengadilan yang berwenang, serta nama orang-orang yang akan melakukan persidangan;

h) dalam hal pengambilan keterangan saksi (Pasal 11, Pasal 19, dan Pasal 23), pokok bahasan mengenai siapa orang yang akan didengar, termasuk, jika perlu, daftar pertanyaan yang akan diajukan dan deskripsi dokumen, catatan atau barang bukti yang akan dihasilkan;

i) dalam hal penyerahan barang atau aset untuk disita atau dikembalikan ke orang yang berhak (Pasal 15), perintah pengadilan yang berlaku dan jika ada, pernyataan tentang status perintah pengadilan tersebut;

j) semua informasi pendukung, bukti, atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan atau dapat membantu Negara Diminta untuk melaksanakan permintaan tersebut.

3. Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi tersebut tidak mencukupi untuk memungkinkan pelaksanaan permintaan, maka Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 28

Pelaksanaan Permintaan

1. Tunduk pada penerapan tindakan sementara sesuai dengan Pasal 7, Otoritas Pusat Negara Diminta harus, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, menginformasikan Otoritas Pusat Negara Peminta tanpa penundaan dan meminta amendemen atau penyelesaian permintaan tersebut.
2. Apabila permintaan tersebut sesuai dengan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Negara Diminta harus segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang untuk pelaksanaan permintaan tersebut.
3. Setelah permintaan dilaksanakan, otoritas yang berwenang harus meneruskan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta permintaan dan informasi serta bukti yang didapatkan. Otoritas Pusat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaannya lengkap dan akurat dan harus mengkomunikasikan hasilnya ke Otoritas Pusat Negara Peminta.
4. Ayat 3 Pasal ini tidak menghalangi sebagian pelaksanaan permintaan. Negara Diminta segera memberitahukan kepada Negara Peminta tentang

keputusannya untuk tidak memenuhi secara keseluruhan atau sebagian dari permintaan bantuan.

5. Negara Diminta harus segera menginformasikan kepada Negara Peminta tentang keadaan yang mungkin akan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 29

Pengecualian dari Persyaratan Legalisasi, Autentisitas dan Formalitas Lainnya

1. Seluruh dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian ini dikecualikan dari persyaratan legalisasi, autentisitas dan ketentuan formal lainnya.
2. Dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan oleh Otoritas Pusat Negara Diminta akan diakui sebagai bukti tanpa justifikasi lebih lanjut atau bukti keasliannya.

Pasal 30

Bahasa

1. Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Republik Indonesia dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa resmi Konfederasi Swiss (Prancis, Jerman atau Italia), sebagaimana ditentukan dalam setiap kasus oleh Otoritas Pusat Swiss. Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Konfederasi Swiss dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
2. Penerjemahan dokumen yang dibuat atau diperoleh dalam pelaksanaan permintaan menjadi kewajiban Negara Peminta.
3. Penerjemahan yang dilakukan oleh Para Pihak bersifat resmi.
4. Dalam kasus mendesak dan apabila disetujui oleh Otoritas Pusat, permintaan dan dokumen pendukung dapat dikirim dalam bahasa Inggris.

Pasal 31

Biaya yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Permintaan

1. Negara Peminta harus, atas permintaan Negara Diminta, mengganti biaya dan pengeluaran berikut yang timbul dari pelaksanaan permintaan
   a) tunjangan, biaya perjalanan, dan uang harian untuk saksi dan perwakilannya, jika ada;
   b) biaya yang berkaitan dengan pemindahan orang yang ditahan;
   c) biaya jasa profesi, biaya perjalanan, dan uang harian untuk para ahli;
   d) tunduk pada kesepakatan lain antara Para Pihak, biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan melalui konferensi video berdasarkan Pasal 24: biaya untuk membuat tautan video di Negara Diminta, upah penerjemah yang disediakan, tunjangan untuk saksi dan ahli, serta biaya perjalanan mereka di Negara Diminta.
2. Jika pelaksanaan permintaan menyebabkan biaya yang sangat besar, Negara Diminta harus memberi tahu Negara Peminta untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang diminta dapat diberikan.

BAB V – PENGIRIMAN DAN PEMBERIAN INFORMASI SECARA SPONTAN UNTUK TUJUAN PENUNTUTAN ATAU PERAMPASAN

Pasal 32

Pengiriman Informasi atau Bukti Secara Spontan

1. Melalui saluran Otoritas Pusat dan dalam batasan yang diberikan oleh hukum nasionalnya, otoritas yang berwenang dari suatu Pihak dapat, tanpa permintaan sebelumnya, mengirimkan kepada Otoritas Pusat Negara Pihak lainnya informasi atau bukti yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan olehnya apabila ditentukan bahwa pengiriman tersebut
   a) memungkinkan pengajuan permintaan sesuai dengan Perjanjian ini;
   b) memungkinkan dimulainya proses hukum pidana; atau
   c) memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang tertunda.

2. Otoritas yang menyediakan informasi tersebut, sesuai dengan hukum nasionalnya, dapat menetapkan syarat-syarat terkait penggunaan informasi tersebut oleh Negara Penerima. Negara Penerima harus terikat oleh ketentuan ini.

Pasal 33

Pemberian informasi untuk tujuan penuntutan atau perampasan

1. Informasi yang diberikan oleh satu Pihak dengan maksud untuk melakukan penuntutan di pengadilan Pihak lain atau untuk merampas hasil kejahatan harus dikomunikasikan di antara Otoritas Pusat.
2. Otoritas Pusat Negara Diminta harus memberitahukan kepada Negara Peminta setiap tindakan yang diambil atas informasi tersebut dan harus meneruskan salinan dari catatan setiap putusan yang dijatuhkan.

Pasal 34

Terjemahan

Pasal 30 berlaku secara analogis pada terjemahan dari informasi dan bukti yang disampaikan dan informasi yang ditetapkan sesuai Pasal 32 dan Pasal 33. Dokumen yang menyertainya tidak harus diterjemahkan.

BAB VI – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Kesesuaian dengan Perjanjian Lain atau Bentuk Kerja Sama Lainnya

Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan memengaruhi bantuan hukum timbal balik yang lebih luas yang telah atau mungkin disepakati antara Para Pihak dalam perjanjian atau pengaturan lain atau yang dihasilkan dari hukum nasional.

Pasal 36
Konsultasi

Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain, secara lisan atau tertulis, pada waktu yang disepakati oleh keduanya, untuk mendorong pelaksanaan yang paling efektif dari Perjanjian ini, secara umum atau dalam kasus tertentu. Para Pihak juga dapat menyetujui langkah praktis yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 37
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik jika Otoritas Pusat tidak dapat mencapai kesepakatan.

Pasal 38
Amendemen

Perjanjian ini dapat diamendemen kapan saja dengan persetujuan bersama Para Pihak. Amendemen tersebut mulai berlaku melalui prosedur yang sama sebagaimana pemberlakuan Perjanjian ini.

Pasal 39
Pemberlakuan dan Pengakhiran

1. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain secara tertulis tentang selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah tanggal diterimanya pemberitahuan yang terakhir.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Dalam hal ini, Perjanjian akan berakhir enam bulan setelah

tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Pengakhiran tidak akan berpengaruh pada kasus yang masih berjalan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bern pada tanggal empat bulan Februari 2019, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jerman, semua naskah adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA	UNTUK KONFEDERASI SWISS
YASONNA H. LAOLY	KARIN KELLER-SUTTER
MENTERI HUKUM	KEPALA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA	DAN KEPOLISIAN FEDERAL

REPUBLIK INDONESIA

TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION

The Republic of Indonesia
and
The Swiss Confederation

Hereinafter referred to as the Contracting Parties

CONSIDERING the ties of friendship and cooperation uniting them;

ACKNOWLEDGING that the fight against transnational crime is a shared responsibility of the international community;

AWARE that it is necessary to strengthen legal cooperation, in particular mutual legal assistance, in order to avoid the increase of criminal activities;

DESIRING to extend to each other the widest measure of mutual legal assistance to combat crime and to improve the effectiveness of cooperation in the investigation, prosecution and punishment of crime;

IN OBSERVANCE of their respective Constitution, laws and regulations as well as the principles of international law, in particular sovereignty, territorial integrity and non-intervention and respecting the internal legal order of each of the Contracting Parties;

HAVING REGARD to the principles laid down in the relevant international conventions, including in the field of human rights, and in an endeavour to cooperate in view of their advancement;

Have agreed the following:

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

Article 1
Obligation to Provide Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

The Contracting Parties undertake to provide each other, in accordance with the provisions of this Treaty, the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters in any investigations, prosecutions or proceedings in respect of offences the punishment of which, at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the Requesting State.

Article 2
Scope of the Assistance

1. Assistance shall include the following measures taken to advance criminal proceedings in the Requesting State:
   a) taking testimony or other statements;
   b) transmitting objects, documents, records and evidence;
   c) handing over of objects and assets for the purpose of confiscation or return;
   d) providing information;
   e) searching of persons and of property;
   f) locating and identifying persons and property, including examining objects and sites;
   g) tracing, freezing, seizing and confiscating proceeds and instrumentalities of crime;
   h) serving documents;

i) making available detained persons with a view to interrogation or confrontation;

j) inviting witnesses and experts to appear and provide testimony in the Requesting State;

k) any other assistance consistent with the objectives of this Treaty mutually acceptable to the Contracting Parties provided that it is not incompatible with the laws of the Requested State.

2. This Treaty shall also apply to any request for mutual legal assistance relating to acts or omissions committed before its entry into force.

3. The Contracting Parties provide each other the widest measure of mutual legal assistance in criminal matters with regard to fiscal offences in accordance with their respective national law.

Article 3

Exclusion

This Treaty shall not apply to the following cases:

a) location, arrest or detention of a person prosecuted or convicted of an offence with a view to extradition;

b) execution of penal judgements;

c) transfer of sentenced persons for the purpose of serving their sentence;

d) transfer of proceedings in criminal matters.

Article 4

Grounds for Refusing or Postponing Assistance

1. Mutual legal assistance in criminal matters may be refused if:

a) the request concerns an offence which the Requested State considers a political offence or an offence connected with a political offence;

b) the request concerns an offence under military law which is not an offence under ordinary criminal law;

c) the Requested State considers that the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, public order or other essential interests of its country as determined by the competent authority;

d) the request concerns facts on the basis of which the prosecuted person has been finally acquitted, pardoned or convicted in the Requested State for an essentially similar offence, provided the penalty imposed is currently being carried out or has already been carried out;

e) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been presented in order to prosecute or to punish a person on account of his or her race, religion, nationality, ethnic origin, sex or political opinions or that the granting of the request could result in aggravating the situation of this person for any of these reasons;

f) there are substantial grounds for believing that the criminal proceeding against the prosecuted person is not in conformity with the guarantees contained in international instruments for the protection of human rights, including the International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December, 1966;

g) the request relates to an offence which carries the death penalty in the Requesting State unless the Requesting State gives such assurances as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be sought, imposed or, if imposed, will not be carried out.

2. The Requested State may postpone mutual legal assistance if the execution of the request would interfere with a criminal proceeding under way in the Requested State.

3. Before refusing or postponing mutual legal assistance in accordance with this Article, the Requested State shall:

a) promptly inform the Requesting State of the reasons for considering the refusal or postponement of assistance; and

b) consider whether assistance can be given on such terms and conditions as it deems necessary. If so, those terms and conditions shall be complied with by the Requesting State.

CHAPTER II - REQUESTS FOR MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Article 5
Applicable Law

1. A request shall be executed in accordance with the law of the Requested State.
2. If the Requesting State desires the application of a specific procedure with regard to the execution of a request for mutual legal assistance, it shall expressly so request, and the Requested State shall comply with the request if its law does not prohibit it.

Article 6
Dual Criminality and Compulsory Measures

1. The execution of requests involving compulsory measures shall be granted only if the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Contracting Parties.
2. In determining whether the alleged conduct constitutes an offence under the laws of both Contracting Parties, it shall be irrelevant whether the law of both Contracting Parties places the alleged conduct within the same category of offence or denominates the offence by the same terminology. The facts described in the request have to correspond to the objective elements of an offence punishable under the law of the Requested State.
3. Compulsory measures include:
   a) searching of persons and of property;
   b) seizing of evidence, including the instruments used in the commission of the offence, as well as the objects and assets constituting the products of the offence;
   c) any measure aiming at the lifting of secrets protected by the criminal law of the Requested State; and
   d) any other measure which involves coercion pursuant to the procedural law of the Requested State.

4. Dual criminality shall not be requested for the execution of requests not involving compulsory measures.

Article 7
Provisional Measures

Upon explicit request by the Requesting State, provisional measures shall be ordered by the competent authority of the Requested State to preserve the existing situation, to safeguard threatened legal interests or to protect jeopardised evidence, if the proceeding envisaged by the request does not appear obviously inadmissible or inappropriate under the law of the Requested State.

Article 8
Limits on Use of Information, Documents and Objects

1. The Requesting State shall not disclose or use information or evidence furnished for purposes other than those stated in the request without the prior consent of the Central Authority of the Requested State.
2. This consent is not necessary if:
   a) the foreign criminal proceeding is directed against other persons having participated in committing the offence; or
   b) the materials are used for an investigation or a proceeding concerning the compensation for damages connected with a proceeding for which assistance has been granted.

Article 9
Personal data

1. Personal data transmitted on the basis of this Treaty shall only be used for the purposes for which the data were transmitted and subject to such conditions as the transmitting State determines. Subject to the exceptions according to Article 8 para. 2 lit. a - b, use of the data for other purposes requires the prior consent of the State transmitting the data.

2. The following provisions shall apply to the transmission and use of personal data transmitted for the purpose of a request for assistance under this Treaty:
   a) Only data that relates to the request shall be transmitted to the competent authority of the Requesting State.
   b) Upon request, the Contracting Party which has received the data shall inform the transmitting State of the use made of the data and the results achieved therefrom.
   c) If it appears to the transmitting State that incorrect data have been transmitted or that data have been transmitted that should not have been, the transmitting State shall notify without delay the State that has received the data; the State that has received the data shall without delay rectify any errors or destroy the data.
   d) The Contracting Parties shall keep records in a readily retrievable form concerning the transmission and receipt of data.
   e) Onward transfers of personal data shall only be permitted in compliance with the national legislation and with the prior consent of the transmitting State.
   f) Transmitted data that are no longer used for the purposes permitted pursuant to the Treaty shall be destroyed without delay, or other measures permitted pursuant to domestic law shall be taken which serve the right of the affected person in the same way.
3. The Contracting Parties shall protect personal data against accidental loss, accidental or unauthorized destruction or modification, unauthorized access, use or disclosure or other misuse.
4. The Contracting Parties shall guarantee the legitimate rights of the person affected by the transmission of the data under this Treaty with regard to information and access to data concerning him or her, correction or deletion of such data or restriction of their processing in appropriate cases, and effective judicial remedy, upon request of the person concerned, in relation to the transmission or use of the information.
5. Each Contracting Party may wholly or partly restrict the rights of the person concerned with regard to information and access to data, including information with regard to any refusal of rectification or erasure of personal data or restriction of processing, if this constitutes a necessary and

proportionate measure in order to take into account legitimate interests so as to safeguard public and national security, protect rights and freedoms of others, avoid obstructing legal inquiries, investigations or proceedings, or avoid prejudicing the prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences or the execution of such offences.

Article 10

Presence of Persons Participating in the Proceeding

On the express request of the Requesting State, the Central Authority of the Requested State shall state the date and place of execution of the request. Officials and persons involved may be present if the Requested State consents.

Article 11

Depositions of Witnesses in the Requested State

1. Witnesses shall be heard in accordance with the law of the Requested State. However, they may also refuse to testify if the law of the Requesting State allows them to do so.
2. If their refusal to testify is based on the law of the Requesting State, the Requested State shall send the matter to the Requesting State for decision. Reasons shall be given for that decision.
3. A witness invoking the right to refuse to testify cannot be the subject of any legal penalty in the Requesting State for that reason.

Article 12

Transmission of Objects, Documents, Records or Evidence

1. Upon request, the Requested State shall transmit objects, documents, records or evidence to the Requesting State.
2. The Requested State may transmit copies of documents, records or evidence requested. If the Requesting State expressly requests the transmission of originals, the Requested State shall make every effort to comply with the request.

3. The Requesting State is required to return what was transmitted as quickly as possible or at the latest after the end of the proceeding unless the Requested State expressly waives the return thereof.
4. Rights claimed by third parties to objects, documents, records or evidence in the Requested State shall not prevent their transmission to the Requesting State.

Article 13
Records of Judges, Courts or Investigating Authorities

1. Upon request, the Requested State shall make available to the authorities of the Requesting State its records of courts or investigating authorities, including judgements and decisions, if these records are important for a judicial proceeding.
2. Documents, records and other materials shall only be handed over if they concern a case which has been closed. If the case has not been closed, the competent authority of the Requested State shall judge whether it is permissible.

Article 14
Judicial Records and Exchange of Information

1. The Requested State shall communicate extracts from and information relating to judicial records, requested by the judicial authorities of the Requesting State and needed in a criminal matter, to the extent permitted by national law.
2. In any case other than that provided for in paragraph 1 of this Article, the request shall be complied with in accordance with the conditions provided for by the law, regulations or practice of the Requested State.
3. The Contracting Parties may, in accordance with their respective national law, provide information on all criminal convictions and subsequent measures entered in the judicial records in respect of the nationals of the other Contracting Party.

Article 15
Handing over of Objects and Assets

1. Objects and assets constituting the product or profits of an offence prosecuted by the Requesting State and the instruments having served to commit the offence which are subject to a precautionary seizure, or their replacement value, may be handed over to the Requesting State for the purpose of confiscation or return to the person entitled, subject to the rights of bona fide third parties.
2. As a rule, the handing over shall intervene based on a final and executable order or sentence of the Requesting State; however, objects and assets may also be handed over by the Requested State, based on domestic law and after mutual consent between the Contracting Parties, in a previous phase of the proceeding if their illicit origin is obvious.

Article 16
Sharing of Confiscated Assets

1. The Contracting Parties undertake to afford each other the widest cooperation in sharing matters according to their national laws.
2. In order to share confiscated assets in the sense of this Article, the Contracting Parties shall conclude, for each individual case, a specific agreement or arrangement laying down the particular conditions for the request, the handing over and transfer of the shared assets.

Article 17
Controlled Delivery

1. Each Contracting Party undertakes to ensure that, at the request of the other Contracting Party, controlled deliveries may be permitted on its territory in the framework of criminal investigations into extraditable offences.
2. The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual case by the competent authorities of the Requested State, with due regard to the national law of that State.

3. Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of the Requested State. Competence to act, direct and control operations shall lie with the competent authorities of that State.

CHAPTER III - SERVING AND APPEARANCES

Article 18
Service of Writs and Records of Judicial Verdicts

1. The Requested State shall effect service of writs and records of judicial verdicts which are transmitted to it for this purpose by the Requesting State.
2. Service may be effected by simple transmission of the writ or record to the person to be served by the Requested State. If the Requesting State expressly requests, service shall be effected by the Requested State in the manner provided for the service of analogous documents under its own law or in a special manner consistent with such law.
3. Proof of service shall be given by means of a receipt dated and signed by the person served or by means of a declaration made by the Requested State that service has been effected and stating the form and date of such service. Either of these documents shall be sent immediately to the Requesting State. The Requested State shall, if the Requesting State so requests, state whether service has been effected in accordance with the law of the Requested State. If service cannot be effected, the reasons shall be communicated in writing immediately to the Requesting State.
4. The request for service of a document to summon a prosecuted person who is in the territory of the Requested State shall reach the Central Authority of that State at the latest thirty calendar days before the date set for appearance.

Article 19
Appearance of Witnesses or Experts in the Requesting State

1. If the Requesting State considers the personal appearance of a witness or expert before its judicial authorities necessary, it shall so mention in its

request for service of the summons and the Requested State shall invite the witness or expert to appear in the territory of the Requesting State.

2. The Requested State shall, without delay, communicate in writing to the Requesting State the decision of the witness or expert with regard to the invitation.
3. A witness or expert who agrees to appear in the Requesting State may require that State to grant an advance for his or her travel costs and subsistence.
4. The allowances to be paid and the travel costs and subsistence to be refunded to a witness or expert by the Requesting State shall be calculated as from his or her place of residence and at rates at least equal to those provided for in the scales and rules in force in the State where the hearing is intended to take place.

Article 20

Failure to Appear

A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of which has been requested, shall not, even if the summons contains a notice of penalty, be subjected to any punishment or measure of restraint, unless subsequently he or she voluntarily enters the territory of the Requesting State and is there again duly summoned.

Article 21

Safe Conduct

1. A witness or expert, whatever his or her nationality, appearing on a summons before the judicial authorities of the Requesting State shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of that State in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the Requested State.
2. A person, whatever his or her nationality, summoned before the judicial authorities of the Requesting State to answer for acts forming the subject of proceedings against him or her, shall not be prosecuted or detained or

subjected to any other restriction of his or her personal liberty for acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the Requested State and not specified in the summons.

3. Without his or her written consent a person to whom paragraphs 1 and 2 are applicable shall not be prompted to testify in the context of a proceeding different from the one forming the basis of the request for mutual legal assistance.
4. The immunity provided for in this Article shall cease when the witness or expert or prosecuted person, having had, for a period of thirty consecutive days from the date when his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving the Requesting State, has nevertheless remained in that territory, or having left it, has returned.
5. A person who consents to appear pursuant to Article 19 or Article 23 shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury.

Article 22

Extent of Testimony in the Requesting State

1. A person appearing on a summons in the Requesting State may be compelled to give testimony or to produce a piece of evidence unless under the law of either Contracting Party he or she has a right to refuse.
2. Article 8 and Article 11, paragraphs 2 and 3 shall apply by analogy.

Article 23

Temporary Transfer of Detained Persons

1. A person in custody whose personal appearance as a witness or for purposes of confrontation is applied for by the Requesting State shall be temporarily transferred to the location where the hearing is intended to take place, provided that he or she shall be sent back to the territory of the Requested State within the period as stipulated by the latter and subject to the provisions of Article 21 of this Treaty insofar as these are applicable.
2. Transfer may be refused if:

   a) the person in custody does not consent;

b) his or her presence is necessary at a criminal proceeding pending in the territory of the Requested State;

c) transfer could prolong his or her detention;

d) the Requesting State is not in a position to comply with any conditions specified by the Requested State relating to the custody or security of the person to be transferred; or

e) there are other overriding grounds for not transferring him or her to the territory of the Requesting State.

3. The transferred person shall remain in custody in the territory of the Requesting State, unless the Requested State applies for his or her release.
4. The person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested State for the period of time served in the custody of the Requesting State.

Article 24

Hearing by Video Conference

1. If a person is in one Contracting Party's territory and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of the other Contracting Party, the latter may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to appear in its territory in person, request that the hearing take place by video conference, as provided for in paragraphs 2 to 6 of this Article.
2. The Requested State shall agree to the hearing by video conference provided that the use of the video conference is not contrary to its fundamental principles. If the Requested State has no access to the technical means for videoconferencing, such means may be made available to it by the Requesting State by agreement between them.
3. The judicial authority of the Requested State shall summon the person concerned to appear in accordance with the forms prescribed by its legislation.
4. With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply:

a) a judicial authority of the Requested State shall be present during the hearing, where necessary assisted by an interpreter, and shall also be responsible for ensuring both the identification of the person to be heard

and respect for the fundamental principles of the law of the Requested State. If the judicial authority of the Requested State is of the view that during the hearing the fundamental principles of the law of the Requested State are being infringed, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing continues in accordance with the said principles;

b) measures for the protection of the person to be heard shall be agreed, where necessary, between the competent authorities of the Requesting and the Requested State;

c) the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the judicial authority of the Requesting State in accordance with its own laws;

d) at the request of the Requesting State or the person to be heard, the Requested State shall ensure that the person to be heard is assisted by an interpreter, if necessary;

e) the person to be heard may claim the right not to testify which would accrue to him or her under the law of either the Requested or the Requesting State.

5. Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the judicial authority of the Requested State shall on the conclusion of the hearing draw up minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of the person heard, the identities and functions of all other persons in the Requested State participating in the hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing took place. The document shall be forwarded by the competent authority of the Requested State to the competent authority of the Requesting State.

6. Each Contracting Party shall take the necessary measures to ensure that, where witnesses or experts are being heard within its territory, in accordance with this Article, and refuse to testify when under an obligation to testify or do not testify according to the truth, its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national procedure.

7. Each Contracting Party may at its discretion also apply the provisions of this Article, where appropriate and with the agreement of their competent judicial authorities, to hearings by video conference involving the accused person or the suspect. In this case, the decision to hold the video conference, and the

manner in which the video conference shall be carried out, shall be subject to agreement between the Contracting Parties, in accordance with their national law and relevant international instruments, including the International Covenant of 16 December 1966 on Civil and Political Rights. Hearings involving the accused person or the suspect shall only be carried out with his or her consent.

CHAPTER IV - PROCEDURE

Article 25
Central Authority

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authority for the Republic of Indonesia is the Ministry of Law and Human Rights and for the Swiss Confederation is the Federal Office of Justice of the Federal Department of Justice and Police.
2. The Central Authorities submit requests for mutual legal assistance in criminal matters covered by this Treaty on behalf of their competent authorities and receive requests made by the other Contracting Party.
3. The Central Authority of the Requested State shall treat the requests for mutual legal assistance as quickly as possible and, where applicable, transmit them for execution to their competent authorities. The Central Authority keeps the coordination of the execution of these requests.
4. The Central Authorities of the Contracting Parties shall communicate directly with each other.
5. The Central Authorities of the Contracting Parties may communicate in English.
6. Either Contracting Party may change its Central Authority, in which case notice shall be given in writing through diplomatic channels.

Article 26

Form of the Request and Channels of Transmission

1. The request for mutual legal assistance shall be made in writing.
2. The request may be transmitted, in case of urgency, by fax or by any other means admitted by the Requested State. The original of the request shall be dispatched within eight days.

Article 27

Contents of the Request

1. A request shall indicate:
   a) the name of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceedings to which the request relates;
   b) the object of and the reason for the request;
   c) a detailed description of the pieces of evidence, the information or the measures requested;
   d) where possible, the complete name, place and date of birth, nationality and the current address of the person who is the subject of the criminal proceeding;
   e) the principal reason why evidence or information is requested, as well as a summary of the relevant facts (date, place and circumstances in which the offence was committed) giving rise to the proceeding in the Requesting State, unless the request is one for service within the meaning of Article 18;
   f) the link existing between the facts under investigation in the Requesting State and the measures to be taken in the Requested State;
   g) the text of statutory provisions, or where this is not possible, a statement of the relevant law applicable;
   h) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;
   i) any time limit within which compliance with the request is desired; and
   j) such other information or undertakings as may be required under the domestic laws of the Requesting State or which is otherwise necessary for the proper execution of the request.

2. In addition, a request shall include:

a) in the case of application of foreign law with regard to the execution (Article 5, paragraph 2), the text of the provisions which are applicable in the Requesting State, and the reason for its application;

b) in the case of participation of persons to the proceeding (Article 10), the designation of the person attending the execution of the request, and the reason for his or her presence;

c) the probable place and the description of the objects and assets constituting the products or profits of an offence or the instruments which served to commit the offence or the main reason why these objects and assets are supposed to be located in the territory of the Requested State;

d) in the case of service of writs and records of judicial verdicts and of summons (Article 18 and Article 19), the name and address of the person to be served;

e) in the case of summons of witnesses or experts (Article 19), a statement that the Requesting State will pay for expenses and allowances and that it will, if requested to do so, pay in advance;

f) in the case of temporary transfer of detained persons (Article 23), the names of the latter, an indication of the officials who have the custody during the transfer, the place to which the detained person is to be transferred and the probable date of that person's return;

g) in the case of hearings by video conference (Article 24), the reason why it is not desirable or possible for the witness or expert to attend, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing;

h) in the case of depositions of witnesses (Article 11, Article 19 and Article 23), the subject matter regarding which the person is to be heard, including, if necessary, a list of questions to be asked and a description of any documents, records or articles of evidence to be produced;

i) in the case of handing over of objects or assets for confiscation or return to the entitled person (Article 15), the court order in force, if any, and a statement about the status of that order;

j) any other supporting information, evidence or documents that is necessary to enable or may assist the Requested State to give effect to the request.

3. If the Requested State considers that the information is not sufficient to enable the request to be executed, it may request additional information to enable the request to be dealt with.

Article 28

Execution of the Request

1. Subject to the adoption of provisional measures pursuant to Article 7, the Central Authority of the Requested State shall, if the request does not conform to the provisions of this Treaty, inform the Central Authority of the Requesting State without delay and request the amendment or completion of the request.
2. If the request appears to be in conformity with this Treaty, the Central Authority of the Requested State shall forward it immediately to the authority competent for its execution.
3. After the request has been executed, the competent authority shall forward to the Central Authority of the Requested State the request and the information and evidence gathered. The Central Authority shall be responsible for ensuring that the execution is complete and accurate and shall communicate the results thereof to the Central Authority of the Requesting State.
4. Paragraph 3 of this Article shall not hinder a partial execution of the request. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its decision not to comply in whole or in part with a request for assistance.
5. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of any circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to the request.

Article 29

Exemption from Legalisation, Authentication and other Formality Requirements

1. All documents, records, statements and other materials transmitted pursuant to this Treaty are exempted from any legalisation, authentication and other formality requirements.
2. Documents, records, statements and other materials transmitted by the Central Authority of the Requested State shall be admitted as evidence without further justification or proof of authenticity.

Article 30

Language

1. A request made pursuant to this Treaty by the Republic of Indonesia and the accompanying documents shall be translated into one of the official languages of the Swiss Confederation (French, German or Italian), as specified in each case by the Swiss Central Authority. A request made pursuant to this Treaty by the Swiss Confederation and the accompanying documents shall be translated into Indonesian.
2. The translation of the documents made or obtained in executing the request shall be incumbent upon the Requesting State.
3. Any translation carried out by the Contracting Parties is of an official nature.
4. In urgent cases and when agreed by the Central Authorities, requests and supporting documents may be transmitted in English.

Article 31

Costs Relating to the Execution of the Request

1. The Requesting State shall, at the request of the Requested State, reimburse only the following costs and disbursements incurred in executing a request:
   a) allowances, travel costs and subsistence for the witnesses and their representatives, if any;
   b) costs relating to the transfer of detained persons;

c) fees, travel costs and subsistence for experts;

d) subject to any different agreement between the Contracting Parties, costs relating to hearings by video conference under Article 24: costs for establishing a video link in the Requested State, the remuneration of interpreters provided by it and allowances to witnesses and experts and their travelling expenses in the Requested State.

2. If the execution of the request causes expenses of an extraordinary nature, the Requested State shall inform the Requesting State thereof to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

CHAPTER V - SPONTANEOUS TRANSMISSION AND LAYING OF INFORMATION FOR PURPOSES OF PROSECUTION OR CONFISCATION

Article 32
Spontaneous Transmission of Information or Evidence

1. Through the channel of its Central Authority and within the limits of its national law, a competent authority of a Contracting Party may, without prior request, transmit to the Central Authority of the other Contracting Party information or evidence gathered in the course of its own criminal investigation or prosecution, when it determines that this transmission is of a nature:

   a) to permit presenting a request pursuant to this Treaty;

   b) to permit the opening of a criminal proceeding; or

   c) to facilitate a pending criminal investigation.

2. The authority providing the information may, pursuant to its national law, impose conditions on the use of such information by the receiving State. The receiving State shall be bound by these conditions.

Article 33

Laying of information for purposes of prosecution or confiscation

1. Information laid by one Contracting Party with a view to prosecution in the courts of the other Contracting Party or to confiscation of proceeds of crime shall be communicated between the Central Authorities.
2. The Central Authority of the Requested State shall notify the Requesting State of any action taken on such information and shall forward a copy of the record of any verdict pronounced.

Article 34

Translation

Article 30 applies by analogy to the translation of information and evidence transmitted and information laid according to Article 32 and Article 33. Accompanying documents do not have to be translated.

CHAPTER VI - FINAL PROVISIONS

Article 35

Compatibility with other Agreements or other Forms of Cooperation

The provisions of this Treaty shall not affect more extensive mutual legal assistance which has been or may be agreed upon between the Contracting Parties in other agreements or arrangements or resulting from national law.

Article 36

Consultations

The Contracting Parties shall consult each other, orally or in writing, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty, in general terms or in a particular case. Both Contracting Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

Article 37
Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of the provisions of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are themselves unable to reach an agreement.

Article 38
Amendment

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties. Such an amendment shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.

Article 39
Entry into Force and Termination

1. The Contracting Parties shall notify in writing each other about the completion of their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty. The Treaty shall enter into force on the sixtieth day after the date of the receipt of the latter notification.
2. Either Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to the other through diplomatic channels. In that case the Treaty shall cease to have effect six months after the date of the receipt of that notification. The termination shall not have any effect on pending cases.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Bern on the fourth day of February 2019 in English, Indonesian and German, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA	FOR THE SWISS CONFEDERATION
YASONNA H. LAOLY	KARIN KELLER-SUTTER
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS	HEAD OF THE FEDERAL DEPARTMENT OF JUSTICE AND POLICE

REPUBLIK INDONESIA

VERTRAG
ZWISCHEN
DER REPUBLIK INDONESIEN
UND
DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT
ÜBER RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN

Die Republik Indonesien
und
die Schweizerische Eidgenossenschaft,
nachfolgend: die Vertragsparteien,

IN ANBETRACHT der Bande der Freundschaft und der Zusammenarbeit, die sie verbinden,

IN DER ERKENNTNIS, dass der Kampf gegen das grenzüberschreitende Verbrechen eine gemeinsame Verantwortung der internationalen Gemeinschaft bildet;

IM BEWUSSTSEIN, dass die justizielle Zusammenarbeit und insbesondere die Rechtshilfe gestärkt werden müssen, um die Zunahme verbrecherischer Tätigkeiten zu verhindern;

IN DEM WUNSCHE, einander gegenseitig ein Höchstmass an Rechtshilfe bei der Verbrechensbekämpfung zu leisten und die Wirksamkeit der Zusammenarbeit bei der Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung von Verbrechen zu verbessern;

IN EINHALTUNG ihrer jeweiligen Verfassung sowie ihrer Gesetze und Vorschriften sowie der Grundsätze des Völkerrechts, insbesondere der Souveränität, der territorialen Integrität und der Nichteinmischung, und in Achtung der innerstaatlichen Rechtsordnung der beiden Vertragsparteien;

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Grundsätze, die in den einschlägigen internationalen Übereinkommen, einschliesslich denjenigen im Bereich der Menschenrechte festgelegt sind, und im Bestreben, im Hinblick auf deren Förderung zusammenzuarbeiten;

haben Folgendes vereinbart:

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Verpflichtung zur Rechtshilfe in Strafsachen

Die Vertragsparteien verpflichten sich, einander nach den Bestimmungen dieses Vertrags weitestgehende Rechtshilfe in Strafsachen zu leisten in allen Ermittlungen, Strafverfolgungen oder Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen, deren Ahndung im Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe ersucht wird, in die Zuständigkeit der Justizbehörden des ersuchenden Staates fällt.

Artikel 2
Umfang der Rechtshilfe

1. Die Rechtshilfe umfasst folgende Massnahmen, die zur Unterstützung eines Strafverfahrens im ersuchenden Staat getroffen werden:

   a) die Entgegennahme von Zeugenaussagen oder anderen Aussagen;
   b) die Übermittlung von Gegenständen, Schriftstücken, Akten und Beweismitteln;
   c) die Herausgabe von Gegenständen und Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung;

d) das Zurverfügungstellen von Informationen;
e) die Durchsuchung von Personen und die Hausdurchsuchung;
f) das Auffinden und Identifizieren von Personen und Eigentum, einschliesslich der Untersuchung von Gegenständen und Örtlichkeiten;
g) das Aufspüren, das Einfrieren, die Beschlagnahme und das Einziehen von Erträgen aus strafbaren Handlungen und von Tatwerkzeugen;
h) die Zustellung von Schriftstücken;
i) das Zurverfügungstellen inhaftierter Personen zum Zweck der Einvernahme oder der Gegenüberstellung;
j) die Einladung an Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige, im ersuchenden Staat zu erscheinen und auszusagen;
k) alle anderen Massnahmen im Rahmen der Rechtshilfe, die mit den Zielen dieses Vertrags vereinbar sind und von den Vertragsparteien akzeptiert werden können, vorausgesetzt, sie sind nicht unvereinbar mit den Gesetzen des ersuchten Staates.

2. Dieser Vertrag ist auch anwendbar auf Ersuchen um Rechtshilfe im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen oder Unterlassungen, die vor seinem Inkrafttreten begangen worden sind.

3. Die Vertragsparteien leisten einander nach ihrem jeweiligen innerstaatlichen Recht weitestgehende Rechtshilfe in Strafsachen mit Bezug auf fiskalische strafbare Handlungen.

Artikel 3
Unanwendbarkeit

Dieser Vertrag ist nicht anwendbar auf:
a) die Verhaftung oder Inhaftierung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen oder die Fahndung nach ihnen zum Zweck ihrer Auslieferung;
b) die Vollstreckung von Strafurteilen;
c) die Überstellung verurteilter Personen zur Verbüssung ihrer Strafe;
d) die Übertragung der Strafverfolgung.

Artikel 4

Gründe für die Ablehnung oder den Aufschub der Rechtshilfe

1. Die Rechtshilfe in Strafsachen kann abgelehnt werden, wenn:
   a) sich das Ersuchen auf eine strafbare Handlung bezieht, die vom ersuchten Staat als politische Straftat oder als mit einer politischen Straftat zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird;
   b) sich das Ersuchen auf eine nach der Militärgesetzgebung strafbare Handlung bezieht, die nach gemeinem Recht keine strafbare Handlung darstellt;
   c) der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Ausführung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder andere wesentliche Landesinteressen, wie sie von seiner zuständigen Behörde festgelegt wurden, zu beeinträchtigen;
   d) das Ersuchen Handlungen betrifft, aufgrund deren eine strafrechtlich verfolgte Person im ersuchten Staat wegen einer im Wesentlichen entsprechenden strafbaren Handlung rechtskräftig freigesprochen, begnadigt oder verurteilt wurde, und sofern eine verhängte Sanktion noch vollzogen wird oder bereits vollzogen ist;
   e) ernsthafte Gründe zur Annahme bestehen, dass das Rechtshilfeersuchen mit dem Ziel eingereicht wurde, eine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts oder ihrer politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen oder dass eine Gutheissung des Ersuchens dazu führen würde, dass sich die Situation dieser Person aus einem der genannten Gründe verschlechtern würde;
   f) ernsthafte Gründe zur Annahme bestehen, dass im Rahmen des Strafverfahrens gegen die strafrechtlich verfolgte Person die Garantien nicht berücksichtigt werden, die in den internationalen Instrumenten für den Schutz der Menschenrechte, insbesondere im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte, festgehalten sind;
   g) sich das Ersuchen auf eine strafbare Handlung bezieht, für die nach dem Recht des ersuchenden Staates die Todesstrafe vorgesehen ist, es sei

denn, der ersuchende Staat gibt dem ersuchten Staat eine von diesem als ausreichend erachtete Zusicherung ab, dass die Todesstrafe nicht beantragt oder verhängt wird oder dass sie, wenn sie verhängt würde, nicht vollstreckt wird.

2. Der ersuchte Staat kann die Rechtshilfe aufschieben, wenn sich die Ausführung des Ersuchens nachteilig auf ein hängiges Strafverfahren in diesem Staat auswirken würde.

3. Bevor der ersuchte Staat die Rechtshilfe nach diesem Artikel ablehnt oder aufschiebt:

   a) teilt er dem ersuchenden Staat umgehend die Gründe mit, die ihn veranlassen, die Ablehnung oder den Aufschub der Rechtshilfe in Betracht zu ziehen; und
   b) prüft er, ob die Rechtshilfe unter den ihm erforderlich scheinenden Bedingungen gewährt werden kann; trifft dies zu, so müssen diese Bedingungen im ersuchenden Staat eingehalten werden.

KAPITEL II - RECHTSHILFEERSUCHEN

Artikel 5
Anwendbares Recht

1. Das Ersuchen wird nach dem Recht des ersuchten Staates ausgeführt.

2. Wünscht der ersuchende Staat, dass bei der Ausführung eines Rechtshilfeersuchens ein besonderes Verfahren angewendet wird, so hat er ausdrücklich darum zu ersuchen; der ersuchte Staat gibt dem Ersuchen statt, sofern sein Recht dem nicht entgegensteht.

Artikel 6

Doppelte Strafbarkeit und Zwangsmassnahmen

1. Einem Ersuchen, dessen Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert, wird nur dann entsprochen, wenn die zur Last gelegte Verhaltensweise gemäss dem Recht beider Vertragsparteien eine Straftat darstellt.

2. Bei der Beurteilung, ob die zur Last gelegte Verhaltensweise gemäss dem Recht beider Vertragsparteien eine Straftat darstellt, ist es unerheblich, ob das Recht beider Vertragsparteien diese Verhaltensweise derselben Kategorie von Straftaten zuordnet oder die Straftat gleich bezeichnet. Die im Ersuchen beschriebenen Handlungen müssen die objektiven Tatbestandsmerkmale einer nach dem Recht des ersuchten Staates strafbaren Handlung aufweisen.

3. Zwangsmassnahmen umfassen:
   a) die Durchsuchung von Personen und die Hausdurchsuchung;
   b) die Beschlagnahme von Beweismitteln, einschliesslich der Tatwerkzeuge, mit denen eine strafbare Handlung begangen wurde, sowie der Gegenstände und Vermögenswerte, die das Erzeugnis einer strafbaren Handlung darstellen;
   c) jede Massnahme, welche die Preisgabe von Geheimnissen bewirkt, die durch das Strafrecht des ersuchten Staates geschützt werden; und
   d) jede andere Massnahme, die mit der Anwendung von Zwang verbunden und als solche im Verfahrensrecht des ersuchten Staates vorgesehen ist.

4. Die doppelte Strafbarkeit ist nicht erforderlich für die Ausführung von Ersuchen, die keine Zwangsmassnahmen erfordern.

Artikel 7

Vorläufige Massnahmen

Auf ausdrückliches Verlangen des ersuchenden Staates ordnet die zuständige Behörde des ersuchten Staates zur Erhaltung des bestehenden Zustands, zur

Wahrung bedrohter rechtlicher Interessen oder zur Sicherung gefährdeter Beweismittel vorläufige Massnahmen an, wenn das Verfahren, auf das sich das Ersuchen bezieht, nach dem Recht des ersuchten Staates nicht offensichtlich unzulässig oder unzweckmässig erscheint.

Artikel 8
Beschränkte Verwendung von Auskünften, Schriftstücken und Gegenständen

1. Der ersuchende Staat darf erhaltene Auskünfte oder Beweismittel nicht ohne vorgängige Zustimmung der Zentralbehörde des ersuchten Staates für andere als die im Ersuchen aufgeführten Zwecke offenlegen oder verwenden.

2. Diese Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn:

   a) das ausländische Strafverfahren sich gegen andere Personen richtet, die an der strafbaren Handlung teilgenommen haben; oder
   b) das Material für eine Untersuchung oder ein Verfahren bezüglich der Leistung von Schadenersatz im Zusammenhang mit einem Verfahren verwendet wird, für das Rechtshilfe gewährt wurde.

Artikel 9
Personenbezogene Daten

1. Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage dieses Vertrags übermittelt werden, dürfen ausschliesslich für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden; ihre Verwendung untersteht den Bedingungen, die vom übermittelnden Staat formuliert werden. Unter Vorbehalt der Ausnahmen von Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b ist für die Verwendung zu anderen Zwecken die vorgängige Zustimmung des übermittelnden Staates erforderlich.

2. Für die Übermittlung und die Verwendung personenbezogener Daten, die im Rahmen eines Ersuchens um Rechtshilfe nach diesem Vertrag übermittelt werden, gelten die folgenden Bestimmungen:

   a) Der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates werden nur Daten übermittelt, die einen Bezug zum Ersuchen haben.
   b) Auf Anfrage informiert die Vertragspartei, welche die Daten erhalten hat, den Staat, der die Daten übermittelt hat, über die Verwendung der Daten und die erzielten Ergebnisse.
   c) Stellt der übermittelnde Staat fest, dass unrichtige Daten übermittelt wurden oder Daten, die nicht hätten übermittelt werden sollen, so benachrichtigt dieser Staat den Staat, der die Daten erhalten hat, unverzüglich. Der Staat, der die Daten erhalten hat, korrigiert allfällige Fehler umgehend oder vernichtet die erhaltenen Daten.
   d) Die Vertragsparteien führen Aufzeichnungen in leicht abrufbarer Form betreffend die Übermittlung und den Erhalt der Daten.
   e) Die Weiterübermittlung personenbezogener Daten ist ausschliesslich in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht und mit vorgängiger Zustimmung des übermittelnden Staates gestattet.
   f) Übermittelte Daten, die nicht länger für die nach diesem Vertrag zulässigen Zwecke benötigt werden, sind unverzüglich zu vernichten; gegebenenfalls sind andere nach innerstaatlichem Recht zulässige Massnahmen zu ergreifen, die den Rechten der betroffenen Person gleichermassen dienen.

3. Die Vertragsparteien schützen personenbezogene Daten vor zufälligem Verlust, zufälliger oder unbefugter Vernichtung oder Veränderung, unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung oder Offenlegung oder anderem Missbrauch.

4. Die Vertragsparteien gewährleisten die legitimen Rechte der von der Datenübermittlung nach diesem Vertrag betroffenen Person in Bezug auf Information und Auskunft über die sie betreffenden Daten, deren Berichtigung oder Löschung oder gegebenenfalls die Einschränkung ihrer

Verarbeitung sowie auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf im Zusammenhang mit der Übermittlung oder Nutzung der Informationen auf Ersuchen der betroffenen Person.

5. Jede Vertragspartei kann die Rechte der betroffenen Person auf Information und Auskunft über Daten, einschliesslich der Information über die Ablehnung der Berichtigung oder der Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung ihrer Verarbeitung ganz oder teilweise beschränken, falls dies eine notwendige und verhältnismässige Massnahme darstellt, um berechtigte Interessen zu berücksichtigen und die öffentliche und nationale Sicherheit sowie die Rechte und Freiheiten anderer zu schützen und zu verhindern, dass gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren behindert und die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung beeinträchtigt werden.

Artikel 10

Anwesenheit von Personen, die am Verfahren teilnehmen

Auf ausdrückliches Verlangen des ersuchenden Staates informiert die Zentralbehörde des ersuchten Staates den ersuchenden Staat über Zeit und Ort der Ausführung des Ersuchens. Die beteiligten Behörden und Personen können bei der Ausführung anwesend sein, wenn der ersuchte Staat zustimmt.

Artikel 11

Zeugenaussagen im ersuchten Staat

1. Die Zeugen und Zeuginnen werden nach dem Recht des ersuchten Staates einvernommen. Sie können jedoch auch die Aussage verweigern, wenn das Recht des ersuchenden Staates dies zulässt.

2. Sofern sich die Zeugnisverweigerung auf das Recht des ersuchenden Staates stützt, übermittelt der ersuchte Staat diesem die Akten zum Entscheid. Der Entscheid muss begründet werden.

3. Macht der Zeuge oder die Zeugin ein Zeugnisverweigerungsrecht geltend, so darf er oder sie deswegen im ersuchenden Staat keinerlei gesetzlichen Sanktionen ausgesetzt werden.

Artikel 12
Übermittlung von Gegenständen, Schriftstücken, Akten oder Beweismitteln

1. Der ersuchte Staat gibt dem ersuchenden Staat auf dessen Verlangen Gegenstände, Schriftstücke, Akten oder Beweismittel heraus.

2. Der ersuchte Staat kann Kopien der verlangten Schriftstücke, Akten oder Beweismittel übermitteln. Verlangt der ersuchende Staat ausdrücklich die Herausgabe der Originale, so gibt der ersuchte Staat dem Begehren so weit wie irgend möglich statt.

3. Der ersuchende Staat ist gehalten, das Herausgegebene möglichst rasch oder spätestens nach Abschluss des Verfahrens zurückzugeben, es sei denn, der ersuchte Staat verzichtet ausdrücklich auf die Rückgabe.

4. Von Dritten im ersuchten Staat geltend gemachte Rechte an Gegenständen, Schriftstücken, Akten oder Beweismitteln hindern deren Herausgabe an den ersuchenden Staat nicht.

Artikel 13
Gerichts- oder Untersuchungsakten

1. Auf Verlangen stellt der ersuchte Staat den Behörden des ersuchenden Staates seine Gerichts- oder Untersuchungsakten, einschliesslich Urteilen und Entscheiden, zur Verfügung, sofern diese Unterlagen für ein Gerichtsverfahren von Bedeutung sind.

2. Schriftstücke, Akten und anderes Beweismaterial werden nur herausgegeben, wenn sie sich auf ein abgeschlossenes Verfahren beziehen. Ist dies nicht der Fall, so entscheidet die zuständige Behörde des ersuchten Staates, ob die Herausgabe dennoch zulässig ist.

Artikel 14

Strafregister und Austausch von Strafnachrichten

1. Der ersuchte Staat übermittelt Auszüge und Informationen aus dem Strafregister, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates verlangt werden und für eine Strafsache erforderlich sind, in dem gemäss seinem innerstaatlichen Recht zulässigen Umfang.

2. In anderen als den in Absatz 1 erwähnten Fällen wird einem solchen Ersuchen unter den Voraussetzungen stattgegeben, die in den gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften oder in der Praxis des ersuchten Staates vorgesehen sind.

3. Die Vertragsparteien können einander in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht über alle strafrechtlichen Verurteilungen und Folgemassnahmen, die die Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei betreffen und die im Strafregister eingetragen sind, informieren.

Artikel 15

Herausgabe von Gegenständen und Vermögenswerten

1. Zu Sicherungszwecken beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte, die das Erzeugnis einer vom ersuchenden Staat verfolgten strafbaren Handlung oder den entsprechenden Erlös darstellen, sowie zu Sicherungszwecken beschlagnahmte Instrumente, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, oder der entsprechende Ersatzwert können dem ersuchenden Staat zur Einziehung oder zur Rückgabe an die berechtigte Person herausgegeben werden, es sei denn, eine gutgläubige Drittperson erhebt Anspruch darauf.

2. Die Herausgabe erfolgt in der Regel nach einem rechtskräftigen und vollstreckbaren Beschluss oder Urteil des ersuchenden Staates; der ersuchte Staat kann jedoch die Gegenstände und Vermögenswerte gestützt auf innerstaatliches Recht und in gegenseitigem Einvernehmen der Vertragsparteien auch in einem früheren Stadium des Verfahrens herausgeben, wenn ihre illegale Herkunft offensichtlich ist.

Artikel 16
Teilung eingezogener Vermögenswerte

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich zur weitestgehenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Teilung gemäss ihrem innerstaatlichen Recht.

2. Zur Teilung eingezogener Vermögenswerte nach diesem Artikel schliessen die Vertragsparteien für jeden Einzelfall eine Übereinkunft oder Vereinbarung ab, welche die besonderen Voraussetzungen für das Ersuchen, die Herausgabe und die Überweisung der geteilten Vermögenswerte festlegt.

Artikel 17
Kontrollierte Lieferung

1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich sicherzustellen, dass auf Ersuchen der anderen Vertragspartei kontrollierte Lieferungen in ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen wegen auslieferungsfähiger Straftaten genehmigt werden können.

2. Die Entscheidung über die Durchführung kontrollierter Lieferungen wird in jedem Einzelfall von den zuständigen Behörden des ersuchten Staates unter Beachtung von dessen innerstaatlichem Recht getroffen.

3. Die kontrollierten Lieferungen werden gemäss den vom ersuchten Staat vorgesehenen Verfahren durchgeführt. Die Befugnis zum Einschreiten, zur Leitung und zur Kontrolle des Einsatzes liegt bei den zuständigen Behörden dieses Staates.

KAPITEL III - ZUSTELLUNG UND ERSCHEINEN

Artikel 18
Zustellung von Verfahrensurkunden und Gerichtsentscheidungen

1. Der ersuchte Staat bewirkt die Zustellung von Verfahrensurkunden und Gerichtsentscheidungen, die ihm zu diesem Zweck vom ersuchenden Staat übermittelt werden.

2. Die Zustellung kann durch einfache Übergabe der Urkunde oder der Entscheidung durch den ersuchten Staat an den Empfänger oder die Empfängerin erfolgen. Auf ausdrückliches Verlangen des ersuchenden Staates bewirkt der ersuchte Staat die Zustellung in einer der Formen, die in seinen Rechtsvorschriften für die Zustellung gleichartiger Schriftstücke vorgesehen sind, oder in einer besonderen Form, die mit diesen Rechtsvorschriften vereinbar ist.

3. Die Zustellung wird durch eine datierte und vom Empfänger oder von der Empfängerin unterschriebene Empfangsbestätigung nachgewiesen oder durch eine Erklärung des ersuchten Staates, welche die Tatsache, die Form und das Datum der Zustellung beurkundet. Das entsprechende Schriftstück wird dem ersuchenden Staat unverzüglich übermittelt. Auf Verlangen des ersuchenden Staates gibt der ersuchte Staat an, ob die Zustellung nach seinen Rechtsvorschriften erfolgt ist. Kann die Zustellung nicht vorgenommen werden, so teilt der ersuchte Staat dem ersuchenden Staat die Gründe unverzüglich schriftlich mit.

4. Ersuchen um Zustellung einer Vorladung an eine strafrechtlich verfolgte Person, die sich im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates befindet, müssen der Zentralbehörde dieses Staates spätestens 30 Kalendertage vor dem für das Erscheinen festgesetzten Zeitpunkt zugehen.

Artikel 19
Erscheinen von Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen im ersuchenden Staat

1. Hält der ersuchende Staat das persönliche Erscheinen eines Zeugen, einer Zeugin oder eines oder einer Sachverständigen vor seinen Justizbehörden für notwendig, so erwähnt er dies im Ersuchen um Zustellung der Vorladung, und der ersuchte Staat fordert die betreffende Person auf, im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staats zu erscheinen.

2. Der ersuchte Staat teilt dem ersuchenden Staat die Entscheidung des Zeugen, der Zeugin oder des oder der Sachverständigen bezüglich der Aufforderung unverzüglich schriftlich mit.

3. Der Zeuge, die Zeugin oder der oder die Sachverständige, der oder die zum Erscheinen im ersuchenden Staat bereit ist, kann von diesem Staat einen Vorschuss für seine oder ihre Reise- und Aufenthaltskosten verlangen.

4. Die dem Zeugen, der Zeugin oder dem oder der Sachverständigen vom ersuchenden Staat zu zahlenden Entschädigungen und zu erstattenden Reise- und Aufenthaltskosten werden vom Aufenthaltsort dieser Person an berechnet und ihr nach Sätzen gewährt, die zumindest denjenigen entsprechen, die in den geltenden Tarifen und Bestimmungen des Staates vorgesehen sind, in dem die Einvernahme stattfinden soll.

Artikel 20
Nichterscheinen

Der Zeuge, die Zeugin oder der oder die Sachverständige, der oder die einer Vorladung, um deren Zustellung ersucht worden ist, nicht Folge leistet, darf selbst dann, wenn die Vorladung Zwangsandrohungen enthält, keiner Strafe oder Zwangsmassnahme unterworfen werden, es sei denn, er oder sie begibt sich später freiwillig in das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates und wird dort erneut ordnungsgemäss vorgeladen.

Artikel 21

Freies Geleit

1. Ein Zeuge, eine Zeugin, ein Sachverständiger oder eine Sachverständige, gleich welcher Staatsangehörigkeit, der oder die auf Vorladung vor den Justizbehörden des ersuchenden Staates erscheint, darf in dessen Hoheitsgebiet wegen Handlungen oder Verurteilungen aus der Zeit vor seiner oder ihrer Abreise aus dem Hoheitsgebiet des ersuchten Staates weder verfolgt noch in Haft gehalten, noch einer sonstigen Beschränkung seiner oder ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden.

2. Eine Person, gleich welcher Staatsangehörigkeit, die vor die Justizbehörden des ersuchenden Staates vorgeladen wurde, um sich wegen einer ihr zur Last gelegten Handlung strafrechtlich zu verantworten, darf dort wegen nicht in der Vorladung aufgeführter Handlungen oder Verurteilungen aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem Hoheitsgebiet des ersuchten Staates weder verfolgt noch in Haft gehalten, noch einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden.

3. Ohne ihre schriftliche Zustimmung darf eine Person, auf welche die Absätze 1 oder 2 anwendbar sind, nicht dazu aufgefordert werden, im Rahmen eines anderen Verfahrens auszusagen als in jenem, auf das sich das Rechtshilfeersuchen bezieht.

4. Der in diesem Artikel vorgesehene Schutz endet, wenn der Zeuge, die Zeugin oder der oder die Sachverständige oder strafrechtlich Verfolgte während 30 aufeinanderfolgenden Tagen, nachdem seine oder ihre Anwesenheit von den Justizbehörden nicht mehr verlangt wurde, die Möglichkeit gehabt hat, das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates zu verlassen, und trotzdem dort bleibt oder wenn er oder sie nach Verlassen dieses Gebiets dorthin zurückgekehrt ist.

5. Eine Person, die einwilligt, gemäss Artikel 19 oder Artikel 23 zu erscheinen, darf aufgrund ihrer Aussage keiner Verfolgung ausgesetzt werden, mit Ausnahme wegen Meineids.

Artikel 22

Umfang der Zeugenaussage im ersuchenden Staat

1. Eine Person, die aufgrund einer Vorladung im ersuchenden Staat erscheint, kann zu einer Zeugenaussage oder zur Herausgabe von Beweismitteln gezwungen werden, es sei denn, es steht ihr nach dem Recht einer der beiden Vertragsparteien ein Verweigerungsrecht zu.

2. Artikel 8 und Artikel 11 Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.

Artikel 23

Vorübergehende Überführung inhaftierter Personen

1. Verlangt der ersuchende Staat das persönliche Erscheinen einer inhaftierten Person als Zeuge oder Zeugin oder zur Gegenüberstellung, so wird sie vorübergehend an den Ort überführt, an dem die Einvernahme stattfinden soll, vorausgesetzt, dass sie innerhalb der vom ersuchten Staat bestimmten Frist rücküberführt wird; vorbehalten bleiben die Be-stimmungen von Artikel 21 dieses Vertrags, soweit anwendbar.

2. Die Überführung kann abgelehnt werden, wenn:
   a) die inhaftierte Person ihr nicht zustimmt;
   b) die Anwesenheit der inhaftierten Person in einem im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates hängigen Strafverfahren notwendig ist;
   c) die Überführung der Person geeignet ist, ihre Haft zu verlängern;
   d) der ersuchende Staat nicht in der Lage ist, die Bedingungen, welche der ersuchte Staat mit Bezug auf den Gewahrsam oder die Sicherheit der zu überführenden Person gestellt hat, zu erfüllen; oder
   e) andere überwiegende Gründe der Überführung der Person ins Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates entgegenstehen.

3. Die überführte Person muss im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates in Haft bleiben, es sei denn, der ersuchte Staat verlangt ihre Freilassung.

4. Der überführten Person wird die im ersuchenden Staat verbüsste Haft an die Verbüssung der im ersuchten Staat ausgesprochenen Strafe angerechnet.

Artikel 24

Einvernahme per Videokonferenz

1. Befindet sich eine Person im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei und soll diese Person als Zeuge, Zeugin, Sachverständiger oder Sachverständige von den Justizbehörden der anderen Vertragspartei einvernommen werden, so kann Letztere, sofern das persönliche Erscheinen der einzuvernehmenden Person in ihrem Hoheitsgebiet nicht zweckmässig oder möglich ist, darum ersuchen, dass die Einvernahme nach Massgabe der Absätze 2–6 per Videokonferenz erfolgt.

2. Der ersuchte Staat bewilligt die Einvernahme per Videokonferenz, sofern deren Einsatz seinen Grundprinzipien nicht entgegensteht. Verfügt der ersuchte Staat nicht über die technischen Vorrichtungen für eine Videokonferenz, so können ihm diese vom ersuchenden Staat in gegenseitigem Einvernehmen zur Verfügung gestellt werden.

3. Die Justizbehörde des ersuchten Staates lädt die betroffene Person in der in ihrem innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Form vor.

4. Für die Einvernahme per Videokonferenz gelten folgende Regeln:
   a) Bei der Einvernahme ist ein Vertreter oder eine Vertreterin der Justizbehörde des ersuchten Staates anwesend, bei Bedarf unterstützt durch einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin. Dieser Vertreter oder diese Vertreterin ist auch für die Identifizierung der einzuvernehmenden Person und für die Einhaltung der Grundprinzipien der Rechtsordnung des ersuchten Staates verantwortlich. Werden nach Ansicht der Justizbehörde des ersuchten Staates bei der Einvernahme die

Grundprinzipien der Rechtsordnung des ersuchten Staates verletzt, so trifft sie unverzüglich die erforderlichen Massnahmen, um die Einvernahme nach diesen Prinzipien fortführen zu können.

b) Die zuständigen Behörden des ersuchenden und des ersuchten Staates vereinbaren bei Bedarf Massnahmen zum Schutz der einzuvernehmenden Person.

c) Die Einvernahme wird unmittelbar von oder unter der Leitung der Justizbehörde des ersuchenden Staates nach dessen innerstaatlichen Rechtsvorschriften durchgeführt.

d) Auf Verlangen des ersuchenden Staates oder der einzuvernehmenden Person sorgt der ersuchte Staat dafür, dass die einzuvernehmende Person bei Bedarf von einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin unterstützt wird.

e) Die einzuvernehmende Person kann sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht, das ihr nach dem Recht des ersuchten oder des ersuchenden Staates zusteht, berufen.

5. Unbeschadet allfälliger zum Schutz von Personen vereinbarter Massnahmen erstellt die Justizbehörde des ersuchten Staates nach der Einvernahme ein Protokoll unter Angabe des Datums und Orts der Einvernahme, der Identität der einvernommenen Person, der Identität und der Funktion der übrigen Personen, die im ersuchten Staat an der Einvernahme teilgenommen haben, aller allfälligen Vereidigungen und der technischen Bedingungen, unter denen die Einvernahme stattgefunden hat. Dieses Dokument wird von der zuständigen Behörde des ersuchten Staates der zuständigen Behörde des ersuchenden Staates übermittelt.

6. Jede Vertragspartei ergreift die erforderlichen Massnahmen, um sicherzustellen, dass in Fällen, in denen Zeugen, Zeuginnen oder Sachverständige nach diesem Artikel in ihrem Hoheitsgebiet einvernommen werden und trotz Aussagepflicht die Aussage verweigern oder falsch aussagen, ihr innerstaatliches Recht genauso angewendet wird, wie wenn die Einvernahme im Rahmen eines innerstaatlichen Verfahrens erfolgen würde.

7. Die Vertragsparteien können nach freiem Ermessen in Fällen, in denen dies angebracht erscheint, und mit Zustimmung ihrer zuständigen Justizbehörden die Bestimmungen dieses Artikels auch auf Einvernahmen per Videokonferenz anwenden, an denen eine beschuldigte Person oder ein Verdächtiger oder eine Verdächtige teilnimmt. In diesem Fall ist die Entscheidung, ob und in welcher Form eine Videokonferenz durchgeführt werden soll, Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien, die diese Entscheidung im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht und den einschlägigen internationalen Übereinkünften, einschliesslich des Internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte, treffen. Einvernahmen von beschuldigten Personen oder Verdächtigen dürfen nur mit deren Einwilligung stattfinden.

KAPITEL IV - VERFAHREN

Artikel 25
Zentralbehörde

1. Zentralbehörde im Sinne dieses Vertrags ist für die Republik Indonesien das Ministerium für Recht und Menschenrechte und für die Schweizerische Eidgenossenschaft das Bundesamt für Justiz des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements.

2. Die Zentralbehörden übermitteln die aufgrund dieses Vertrags gestellten Rechtshilfeersuchen in Strafsachen ihrer zuständigen Behörden und nehmen Ersuchen der anderen Vertragspartei entgegen.

3. Die Zentralbehörde des ersuchten Staates bearbeitet die Rechtshilfeersuchen möglichst rasch und übermittelt sie gegebenenfalls zur Ausführung an die zuständigen Behörden. Die Zentralbehörde behält die Koordination der Ausführung dieser Ersuchen.

4. Die Zentralbehörden der Vertragsparteien verkehren direkt miteinander.

5. Die Zentralbehörden der Vertragsparteien können auf Englisch miteinander kommunizieren.

6. Jede der beiden Vertragsparteien kann ihre Zentralbehörde ändern; dies wird der anderen Vertragspartei auf diplomatischem Weg schriftlich mitgeteilt.

Artikel 26

Form des Ersuchens und Übermittlungswege

1. Rechtshilfeersuchen werden schriftlich abgefasst.

2. In dringenden Fällen kann das Ersuchen per Fax oder auf jedem anderen vom ersuchten Staat zugelassenen Weg übermittelt werden. Die Originalfassung des Ersuchens muss innerhalb von acht Tagen versandt werden.

Artikel 27

Inhalt des Ersuchens

1. Das Ersuchen muss Folgendes enthalten:

   a) die Bezeichnung der Behörde, welche die Ermittlung, die Strafverfolgung oder das Gerichtsverfahren durchführt, auf die oder das sich das Ersuchen bezieht;
   b) den Gegenstand und den Grund des Ersuchens;
   c) eine detaillierte Beschreibung der Beweismittel, der Auskünfte oder der Massnahmen, um die ersucht wird;
   d) soweit möglich, den vollständigen Namen, den Geburtsort und das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und die aktuelle Adresse der Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet;
   e) den Hauptgrund, warum die Beweismittel oder Auskünfte verlangt werden, sowie eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts (Zeitpunkt, Ort und Umstände der Tatbegehung), der im ersuchenden Staat Anlass zum Verfahren gibt, ausgenommen bei Zustellungsersuchen nach Artikel 18;

f) den Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt, der im ersuchenden Staat untersucht wird, und den Massnahmen, die im ersuchten Staat ergriffen werden sollen;

g) den Wortlaut der Gesetzesbestimmungen oder, soweit dies nicht möglich ist, die Angabe des massgeblichen anwendbaren Rechts;

h) den gewünschten Vertraulichkeitsgrad sowie die Gründe dafür;

i) eine allfällige Frist, innerhalb deren die Ausführung des Ersuchens gewünscht wird; und

j) andere Informationen oder Handlungen, die gemäss dem innerstaatlichen Recht des ersuchenden Staates erforderlich sind oder die anderweitig für die ordnungsgemässe Ausführung des Ersuchens notwendig sind.

2. Zusätzlich muss das Ersuchen enthalten:

a) bei der Anwendung ausländischen Rechts im Hinblick auf die Ausführung (Art. 5 Abs. 2) den Wortlaut der im ersuchenden Staat anwendbaren Gesetzesbestimmungen und den Grund für deren Anwendung;

b) bei der Teilnahme von Verfahrensbeteiligten (Art. 10) die Bezeichnung der Person, die bei der Ausführung des Ersuchens anwesend ist, und den Grund ihrer Anwesenheit;

c) den mutmasslichen Ort und eine Beschreibung der Gegenstände und Vermögenswerte, die das Erzeugnis einer strafbaren Handlung oder den entsprechenden Erlös darstellen, oder der Instrumente, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, oder den Hauptgrund, warum diese Gegenstände und Vermögenswerte im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates vermutet werden;

d) bei der Zustellung von Verfahrensurkunden, Gerichtsentscheidungen und Vorladungen (Art. 18 und 19) den Namen und die Adresse des Empfängers oder der Empfängerin;

e) bei einer Vorladung von Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen (Art. 19) eine Erklärung, wonach der ersuchende Staat für Kosten und Entschädigungen aufkommt und auf Verlangen einen Kostenvorschuss leistet;

f) bei der vorübergehenden Überführung inhaftierter Personen (Art. 23) deren Namen, die Angabe der Beamten oder Beamtinnen, in deren Gewahrsam sich die inhaftierte Person während der Überführung befindet, den Ort, wohin sie überführt werden soll, sowie den mutmasslichen Zeitpunkt ihrer Rücküberführung;

g) bei einer Einvernahme per Videokonferenz (Art. 24) den Grund, weshalb das persönliche Erscheinen des Zeugen, der Zeugin oder des oder der Sachverständigen nicht zweckmässig oder möglich ist, die Angabe der Justizbehörde und der Personen, welche die Einvernahme durchführen werden;

h) bei Zeugenaussagen (Art. 11, Art. 19 und Art. 23) den Gegenstand, zu dem die Person befragt werden soll, einschliesslich falls notwendig eine Liste mit den zu stellenden Fragen und eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, die vorgelegt werden sollen;

i) bei der Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückgabe an die berechtigte Person (Art. 15) den rechtskräftigen Gerichtsentscheid, falls vorhanden, und eine Erklärung über den Status des Entscheids;

j) alle weiteren ergänzenden Informationen, Beweise oder Schriftstücke, die für die Ausführung des Ersuchens durch den ersuchten Staat notwendig oder nützlich sind.

3. Erachtet der ersuchte Staat die Informationen als ungenügend, um das Ersuchen auszuführen, so kann er zusätzliche Informationen verlangen, die es ermöglichen, das Ersuchen zu behandeln.

Artikel 28

Ausführung des Ersuchens

1. Entspricht das Ersuchen nicht den Bestimmungen dieses Vertrags, so teilt die Zentralbehörde des ersuchten Staates dies der Zentralbehörde des ersuchenden Staates unverzüglich mit und verlangt die Änderung oder Ergänzung des Ersuchens; vorbehalten bleibt die Anordnung vorläufiger Massnahmen nach Artikel 7.

2. Erscheint das Ersuchen vertragskonform, so leitet die Zentralbehörde des ersuchten Staates es unmittelbar an die für die Ausführung zuständige Behörde weiter.

3. Nach der Ausführung des Ersuchens übermittelt die zuständige Behörde das Ersuchen sowie die gesammelten Informationen und Beweismittel der Zentralbehörde des ersuchten Staates. Die Zentralbehörde vergewissert sich, dass das Ersuchen vollständig und ordnungsgemäss ausgeführt ist, und teilt die Ergebnisse der Zentralbehörde des ersuchenden Staates mit.

4. Absatz 3 dieses Artikels steht einer teilweisen Ausführung des Ersuchens nicht entgegen. Der ersuchte Staat informiert den ersuchenden Staat unverzüglich über seine Entscheidung, dem Ersuchen um Rechtshilfe ganz oder teilweise nicht zu entsprechen.

5. Der ersuchte Staat informiert den ersuchenden Staat unverzüglich über alle Umstände, die die Beantwortung des Ersuchens wesentlich verzögern könnten.

Artikel 29

Befreiung von jeder Beglaubigung, Echtheitsbestätigung und anderen Formerfordernissen

1. Schriftstücke, Akten, Aussagen und anderes Beweismaterial, die nach diesem Vertrag übermittelt werden, bedürfen keiner Beglaubigung, Echtheitsbestätigung oder anderer Formerfordernisse.

2. Schriftstücke, Akten, Aussagen und anderes Beweismaterial, die von der Zentralbehörde des ersuchten Staates übermittelt werden, werden ohne weitere Formerfordernisse oder Beglaubigungsnachweise als Beweismittel zugelassen.

Artikel 30

Sprache

1. Von der Republik Indonesien im Rahmen dieses Vertrags gestellte Ersuchen sowie die beigefügten Schriftstücke werden in eine der Amtssprachen der Schweizerischen Eidgenossenschaft übersetzt (Französisch, Deutsch oder Italienisch), wie sie von der schweizerischen Zentralbehörde für jeden Einzelfall angegeben wird. Von der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Rahmen dieses Vertrags gestellte Ersuchen sowie die beigefügten Schriftstücke werden ins Indonesische übersetzt.

2. Die Übersetzung der Schriftstücke, die bei der Ausführung des Ersuchens erstellt oder erlangt werden, obliegt dem ersuchenden Staat.

3. Von den Vertragsparteien vorgenommene Übersetzungen haben amtlichen Charakter.

4. In dringenden Fällen und wenn zwischen den Zentralbehörden vereinbart, können Ersuchen und Begleitdokumente auf Englisch übermittelt werden.

Artikel 31

Ausführungskosten

1. Der ersuchende Staat vergütet auf Verlangen des ersuchten Staates nur folgende durch die Ausführung des Ersuchens entstandenen Kosten und Auslagen:

   a) Entschädigungen, Reisekosten und Aufenthaltskosten für Zeugen und Zeuginnen und gegebenenfalls deren Rechtsbeistände;
   b) Kosten im Zusammenhang mit der Überführung inhaftierter Personen;
   c) Honorare, Reisekosten und Aufenthaltskosten für Sachverständige;
   d) sofern die Vertragsparteien keine andere Vereinbarung treffen, die Kosten im Zusammenhang mit der Einvernahme per Videokonferenz nach Artikel 24; die Kosten für die Herstellung der Videoverbindung im

ersuchten Staat, die Vergütung der von diesem zur Verfügung gestellten Dolmetscher und Dolmetscherinnen und die Entschädigung von Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen sowie deren Reisekosten im ersuchten Staat.

2. Verursacht die Ausführung des Ersuchens ausserordentliche Kosten, so benachrichtigt der ersuchte Staat den ersuchenden Staat darüber, um die Bedingungen festzusetzen, unter denen die verlangte Rechtshilfe geleistet werden kann.

KAPITEL V - UNAUFGEFORDERTE ÜBERMITTLUNG UND ANZEIGEN ZUM ZWECK DER STRAFVERFOLGUNG ODER DER EINZIEHUNG

Artikel 32
Unaufgeforderte Übermittlung von Informationen und Beweismitteln

1. Im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts kann eine zuständige Behörde einer Vertragspartei über ihre Zentralbehörde ohne vorheriges Ersuchen der Zentralbehörde der anderen Vertragspartei Informationen oder Beweismittel übermitteln, die sie im Verlauf ihrer eigenen Ermittlungen oder Strafverfolgung erlangt hat, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:

   a) die Einreichung eines Ersuchens nach diesem Vertrag zu ermöglichen;
   b) ein Strafverfahren einzuleiten; oder
   c) die Durchführung einer laufenden Strafuntersuchung zu erleichtern.

2. Die Behörde, welche die Informationen übermittelt, kann gemäss ihrem innerstaatlichen Recht Bedingungen für die Verwendung dieser Informationen durch den empfangenden Staat festlegen. Der empfangende Staat ist an diese Bedingungen gebunden.

Artikel 33
Anzeigen zum Zweck der Strafverfolgung oder der Einziehung

1. Anzeigen einer Vertragspartei zum Zweck der Strafverfolgung durch die Gerichte der anderen Vertragspartei oder zum Zweck der Einziehung von Erträgen aus Straftaten sind Gegenstand des Schriftverkehrs zwischen den Zentralbehörden.

2. Die Zentralbehörde des ersuchten Staates teilt dem ersuchenden Staat die aufgrund dieser Anzeige getroffenen Massnahmen mit und übermittelt gegebenenfalls eine Kopie der ergangenen Entscheidung.

Artikel 34
Übersetzung

Artikel 30 ist analog auf die Übersetzung von Informationen und Beweismitteln nach den Artikeln 32 und 33 anwendbar. Die beigefügten Schriftstücke müssen nicht übersetzt werden.

KAPITEL VI - SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 35
Vereinbarkeit mit anderen Vereinbarungen und Formen der Zusammenarbeit

Die Bestimmungen dieses Vertrags stehen einer weitergehenden Rechtshilfe nicht entgegen, welche die Vertragsparteien in anderen Vereinbarungen oder Abmachungen beschlossen haben oder beschliessen könnten oder welche sich aus innerstaatlichem Recht ergeben könnte.

Artikel 36
Meinungsaustausch

Die Vertragsparteien beraten sich, mündlich oder schriftlich, zu in gegenseitigem Einvernehmen vereinbarten Zeiten, um die wirksamste Umsetzung dieses Vertrags im Allgemeinen oder in Bezug auf einen Einzelfall zu fördern. Die Vertragsparteien können sich ebenfalls auf praktische Massnahmen einigen, die notwendig sein können, um die Umsetzung dieses Vertrags zu erleichtern.

Artikel 37
Beilegung von Streitigkeiten

Streitigkeiten betreffend die Auslegung, Anwendung oder Umsetzung dieses Vertrags werden auf diplomatischem Weg gelöst, falls die Zentralbehörden sie nicht selber beilegen können.

Artikel 38
Vertragsänderung

Dieser Vertrag kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien geändert werden. Eine solche Änderung tritt im gleichen Verfahren in Kraft, das für das Inkrafttreten des Vertrags gilt.

Artikel 39
Inkrafttreten und Kündigung

1. Die Vertragsparteien unterrichten sich gegenseitig schriftlich über die Erfüllung ihrer jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Vertrags. Der Vertrag tritt am 60. Tag nach Erhalt der letzten Mitteilung in Kraft.

2. Jede der beiden Vertragsparteien kann diesen Vertrag jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei auf diplomatischem Weg kündigen. In diesem Fall tritt der Vertrag sechs Monate nach Erhalt dieser Mitteilung ausser Kraft. Auf laufende Rechtshilfeverfahren hat die Kündigung keine Auswirkungen.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

GESCHEHEN in Bern, am 4. Februar 2019, in zwei Urschriften in englischer, indonesischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist. Im Falle von sich widersprechenden Auslegungen ist die englische Fassung massgebend.

Für die Republik Indonesien	**Für die Schweizerische Eidgenossenschaft**
YASONNA H. LAOLY	**KARIN KELLER-SUTTER**
MINISTER FÜR JUSTIZ UND MENSCHENRECHTE	**VORSTEHERIN DES EIDGENÖSSISCHEN JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENTS**